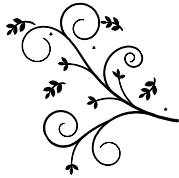




LAPORAN KEUANGAN SEMESTER I TAHUN 2026

PERIODE 30 JUNI 2026



KATA PENGANTAR



Sebagaimana diamanatkan Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Menteri / Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran / Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara / Lembaga yang dipimpinnya.

Pengadilan Tinggi Bangka Belitung adalah salah satu Entitas Akuntansi di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan menyusun Laporan Keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan SEMESTER I TAHUN 2026 UAKPA Pengadilan Tinggi Bangka Belitung mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan, serta Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 217/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Pemerintah Pusat, Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor : 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi, dan Peraturan S-31/PB/PB.6/2023 tentang Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan UAKPA SEMESTER I TAHUN 2026. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan SEMESTER I TAHUN 2026 UAKPA ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pemakai laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Kantor Pengadilan Tinggi Bangka Belitung. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Pangkalpinang, 27 Juli 2026

Sekretaris,



Rosmala Sari

The page features an abstract geometric design. In the top right corner, there are several overlapping triangles in shades of green and blue. A thin blue line runs diagonally from the top left towards the bottom right. The text 'DAFTAR ISI' is centered in the middle of the page.

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI

kata Pengantar.....	2
Daftar isi.....	4
Pernyataan Tanggungjawab.....	5
Daftar Tabel	7
Daftar Grafik.....	9
Ringkasan.....	11
I. Laporan Realisasi Anggaran.....	15
II.Neraca.....	17
III.Laporan Operasional.....	20
IV.Laporan Perubahan Ekuitas.....	23
V. Catatan atas Laporan Keuangan.....	24
A. Penjelasan Umum.....	25
B. Penjelasan atas Pos-Pos Realisasi Anggaran.....	35
C. Penjelasan atas Pos-Pos Neraca.....	39
D. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional.....	43
E. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Ekuitas.....	46
F. Pengungkapan Lainnya.....	48
VI. Lampiran dan Daftar.....	54
1.Rincian Nilai Perolehan, Akumulasi Penyusutan dan Nilai Buku Aset Tetap.....	56
2.Konstruksi Dalam Pengerjaan.....	58
3.Rincian Hibah.....	60
4.Monitoring Penutupan Rekening.....	62
5.Daftar Rekening	64
6.Kertas Kerja Telaah.....	66
7.Laporan Realisasi Anggaran (Face).....	72
8.Laporan Realisasi Pendapatan Menurut Akun.....	74
9.Laporan Belanja Menurut Akun.....	76
10.Neraca.....	82
11.Neraca Percobaan Kas.....	83
12.Neraca Percobaan Akrua.....	84
13.Laporan Operasional.....	86
14.Laporan Perubahan Ekuitas.....	89
15.Laporan Persediaan.....	90
16.Laporan CRBMN.....	91
17.Laporan Penyusutan BMN.....	92
18.Laporan Barang Kuasa Pengguna.....	94
20.Laporan Posisi BMN di Neraca.....	98

LAMPIRAN TAMBAHAN

- Berita Acara Opname Fisik Persediaan
- LPJ Bendahara
- Surat Hasil Rekonsiliasi (SHR)
- Laporan Realisasi Kinerja

PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB

UNIT AKUNTANSI PEMBANTU PENGGUNA ANGGARAN WILAYAH PENGADILAN TINGGI BANGKA BELITUNG

Penggabungan Laporan Keuangan SEMESTER I TAHUN 2026 Pengadilan Tinggi Bangka Belitung tingkat Satker selaku UAKPA yang terdiri dari: (a) Laporan Realisasi Anggaran, (b) Neraca, (c) Laporan Operasional, (d) Laporan Perubahan Ekuitas, dan (e) Catatan atas Laporan Keuangan per 30 Juni 2026 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami, sedangkan substansi Laporan Keuangan dari masing-masing Satuan Kerja merupakan tanggungjawab UAKPA.

Laporan Keuangan SEMESTER I TAHUN 2026 Pengadilan Tinggi Bangka Belitung telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi serta kinerja keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Pangkalpinang, 27 Juli 2026

Sekretaris,



Rosmala Sari



DAFTAR TABEL

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025.....	11
Tabel 2 Ringkasan Neraca 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025.....	12
Tabel 3 Jenis Kewenangan Satuan Kerja.....	28
Tabel 4 Perhitungan Penyisihan Piutang.....	31
Tabel 5 Masa Manfaat Aset Tetap.....	33
Tabel 6 Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud.....	34
Tabel 7 Rincian Anggaran Awal dan Setelah Revisi per 30 Juni 2026.....	35
Tabel 8 Rincian Estimasi dan Realisasi PNPB per 30 Juni 2026.....	35
Tabel 9 Perbandingan Realisasi PNPB per 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2026.....	36
Tabel 10 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per 30 Juni 2026.....	36
Tabel 11 Perbandingan Realisasi Belanja per 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025.....	37
Tabel 12 Rincian Belanja Barang per 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025.....	38
Tabel 13 Rincian Aset Lancar per 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025.....	39
Tabel 14 Kas di Bendahara Pengeluaran per 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025.....	39
Tabel 15 Rincian Persediaan per 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025.....	40
Tabel 16 Rincian Kewajiban Jangka Pendek per 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025.....	40
Tabel 17 Rincian Utang kepada Pihak Ketiga per 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025.....	41
Tabel 18 Perbandingan Utang yang Belum Diterima Tagihannya per 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025.....	41
Tabel 19 Perbandingan Ekuitas per 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025	42
Tabel 20 Rincian Realisasi Pendapatan PNPB per 30 Juni 2026	43
Tabel 21 Perbandingan Realisasi PNPB per 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025.....	43
Tabel 22 Rincian Beban Persediaan per 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025.....	44
Tabel 23 Rincian Beban Barang dan Jasa per 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025.....	44
Tabel 24 Rincian Beban Perjalanan Dinas per 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025.....	45
Tabel 25 Rincian Kegiatan Non Operasional per 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025.....	45
Tabel 26 Tabel Antar Entitas	46
Tabel 27 Rincian Transfer Keluar 30 Juni 2026	47
Tabel 28 Laporan Kinerja Satker Pengadilan Tinggi Bangka Belitung.....	49
Tabel 29 Laporan Keuangan Perkara Periode 30 Juni 2026.....	52
Tabel 30 Penandatanganan Pejabat Perbendaharaan.....	53
Tabel 31 Rincian Nilai Perolehan, Akumulasi Penyusutan, dan Nilai Buku Aset Tetap periode 30 Juni 2026.....	56
Tabel 32 Rincian KDP periode 30 Juni 2026.....	58
Tabel 33 Rincian Hibah Langsung periode 30 Juni 2026.....	60
Tabel 34 Monitoring Penutupan Rekening Kementerian/Lembaga periode 30 Juni 2026.....	62
Tabel 35 Daftar Rekening Kementerian/Lembaga periode 30 Juni 2026.....	64



DAFTAR GRAFIK

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1 Perbandingan Realisasi PNBP per 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025.....	36
Grafik 2 Komposisi Anggaran dan Realisasi Belanja per 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025.....	37

The image features an abstract geometric design in the top right corner. It includes a large green triangle, a smaller light blue triangle, and a thin blue line that extends diagonally across the page. The word "RINGKASAN" is centered in the middle of the page in a bold, blue, sans-serif font.

RINGKASAN

RINGKASAN

Berdasarkan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi, Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan kepada Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal, dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP).

Laporan Keuangan SEMESTER I TAHUN 2026 UAKPA Pengadilan Tinggi Bangka Belitung ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi :

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2025 dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan, belanja, selama periode 1 Januari 2025 s.d. 30 Juni 2026.

Realisasi Pendapatan Negara pada per 30 Juni 2026 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp.300,000,- atau mencapai 38 persen dari estimasi pendapatannya sebesar Rp.780,000,-

Realisasi Belanja Negara pada 30 Juni 2026 adalah sebesar Rp.85,431,200,- atau mencapai 36 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp.240,483,000,-

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025 dapat disajikan sebagai berikut.

Uraian	30 Juni 2026 (dalam rupiah)			30 Juni 2025 (dalam rupiah)
	Anggaran	Realisasi	% real. thd anggaran	Realisasi
Pendapatan Negara	780.000	300.000	38	160,000
Belanja Negara	21,771,068,000	12,841,906,157	59	70,271,080

Tabel 1 Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana per 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025.

Neraca yang disajikan adalah hasil dari proses Sistem Akuntansi Instansi, sebagaimana yang diwajibkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi.

Nilai Aset per 30 Juni 2026 dicatat dan disajikan sebesar Rp.21,714,148,- yang terdiri dari : Aset Lancar sebesar Rp21,714,148,- Aset Tetap (bersih) sebesar Rp 0; Aset piutang sebesar Rp.0,-

Nilai Kewajiban seluruhnya tersaji sebesar Rp7,655,000,- yang terdiri dari Kewajiban Jangka Pendek sebesar Rp7,655,000,- dan Kewajiban Jangka Panjang sebesar Rp.0.

Nilai Ekuitas Dana disajikan sebesar Rp21,714,148,-

Ringkasan Neraca per 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025 dapat disajikan sebagai berikut:

Uraian	Periode Neraca		Kenaikan/Penurunan	
	30 Juni 2026 (dalam rupiah)	31 Desember 2025 (dalam rupiah)	Naik / Turun (Rp)	%
ASET				
Aset Lancar	21,714,148	30,918,728	(9,204,580)	(29.77)
Aset Tetap	0	0	0	-
Aset Lainnya	0	0	0	-
JUMLAH ASET	21,714,148	30,918,728	(9,204,580)	(29.77)
KEWAJIBAN				
Kewajiban Jangka Pendek	7,655,000	3,999,500	3,655,500	91.40
Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	-
JUMLAH KEWAJIBAN	7,655,000	3,999,500	3,655,500	91.40
EKUITAS				
Ekuitas	21,714,148	26,919,228	(12,860,080)	47.77
JUMLAH EKUITAS	21,714,148	26,919,228	(12,860,080)	47.77
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas	11.797.616	35.309.910	(28.512.294)	(66,59)

Tabel 2 Ringkasan Neraca 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus(defisit) dari operasi, surplus(defisit) dari kegiatan non operasional, surplus(defisit) sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus(defisit) -LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 30 Juni 2026 adalah sebesar Rp300,000,- sedangkan jumlah beban adalah sebesar (Rp85,974,700,-) sehingga terdapat surplus(defisit) dari Kegiatan Operasional senilai (Rp.85,674,700,-) Surplus(defisit) dari kegiatan non operasional senilai Rp.0,- Surplus/Defisit sebelum pos luar biasa Rp.(85,674,700,-) sehingga entitas mengalami surplus(defisit)-LO sebesar (Rp85,674,700,-).

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2025 adalah sebesar Rp.26,919,228,- dikurangi surplus(defisit)-LO sebesar (Rp.85,674,700,-) kemudian ditambah dengan Transaksi Antar Entitas sebesar Rp.45.647.942,- sehingga Ekuitas Akhir Entitas pada tanggal 30 Juni 2026 adalah senilai Rp.5.197.616,-.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 30 Juni 2026, Pendapatan Negara dan Hibah dan Belanja Negara diakui berdasarkan basis kas, yaitu diakui pada saat kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas negara. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 30 Juni 2026 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

Dalam penyajian Neraca untuk periode per 30 Juni 2026, nilai Aset, Kewajiban, dan Ekuitas Dana diakui berdasarkan basis akrual, yaitu diakui pada saat diperolehnya hak atas dan timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas negara.

The background features an abstract geometric design. It includes several large green triangles of varying sizes and orientations. A prominent blue line runs diagonally from the top left towards the bottom right. There are also smaller, semi-transparent blue and light blue triangles scattered throughout the upper half of the image. In the bottom right corner, there is a green triangle and a short blue line segment.

I. LRA PERBANDINGAN

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

PENGADILAN TINGGI BANGKA BELITUNG
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 Juni 2026 DAN 30 Juni 2025
(dalam satuan rupiah)

No	Uraian	Catatan	30 Juni 2026 (dalam rupiah)			30 Juni 2025 (dalam rupiah)
			Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
A	PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH	B				
1.	Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1.	780.000	300.000	38	160,000
	Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah		780.000	300.000	38	160,000
B	BELANJA	B.2				
1.	Belanja Barang	B.2.1	280.483.000	85,431,200	36	70,271,080
	Jumlah Belanja Negara		280.483.000	85,431,200	36	70,271,080

*Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan.

Pangkalpinang, 30 Juni 2026
 Mengetahui,
 Kuasa Pengguna Anggaran



Rosmala Sari



II. NERACA PERBANDINGAN

II. NERACA

PENGADILAN TINGGI BANGKA BELITUNG
NERACA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 Juni 2026 DAN
31 DESEMBER 2025 (dalam satuan rupiah)

Uraian	Catatan	30 Juni 2026 (dalam rupiah)	31 Desember 2025 (dalam rupiah)
ASET			
ASET LANCAR	C.1		
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1.1	5.000.000	0
Persediaan	C.1.2	16,714,148	30,918,728
JUMLAH ASET LANCAR		21,714,148	30,918,728
JUMLAH ASET		21,714,148	30,918,728
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	C.2		
Utang kepada Pihak Ketiga	C.2.1	0	3,999,500
Utang Yang Belum Ditagihkan	C.2.2	2,655,000	0
Uang Muka dari KPPN	C.2.3	5.000.000	0
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		7,655,000	3,999,500
JUMLAH KEWAJIBAN		7,655,000	3,999,500
EKUITAS			

Uraian	Catatan	30 Juni 2026 (dalam rupiah)	31 Desember 2025 (dalam rupiah)
Ekuitas	C.3	14,059,148	26,919,228
JUMLAH EKUITAS		14,059,148	26,919,228
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		21,714,148	30,918,728

*Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.

Pangkalpinang, 30 Juni 2026
Mengetahui,
Kuasa Pengguna Anggaran



Rosmala Sari



III. LAPORAN OPERASIONAL

III. LAPORAN OPERASIONAL

PENGADILAN TINGGI BANGKA BELITUNG
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 Juni 2026 DAN 30 Juni 2025
(dalam satuan rupiah)

Uraian	Catatan	30 Juni 2026 (dalam rupiah)	30 Juni 2025 (dalam rupiah)
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Penerimaan Negara Bukan Pajak	D.1	300.000	160.000
JUMLAH PENDAPATAN		300.000	160.000
BEBAN OPERASIONAL			
Beban Persediaan	D.2	8,905,000	8,891,156
Beban Barang dan Jasa	D.3	27,602,000	16,280,000
Beban Perjalanan Dinas	D.4	49,467,700	47,249,080
JUMLAH BEBAN		85,974,700	72,420,236
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Operasional		(85,674,700)	(72,260,236)
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
Surplus / Defisit Pelepasan Aset Non Lancar		0	0
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar		0	0
Beban Pelepasan Aset Non Lancar		0	0
Surplus/defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		0	0
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		0	0
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		0	0

Uraian	Catatan	30 Juni 2026 (dalam rupiah)	30 Juni 2025 (dalam rupiah)
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.5	0	0
Surplus (Defisit) Sebelum Pos Luar Biasa		(72.260.236)	(95.479.606)
POS LUAR BIASA		0	0
Pos Luar Biasa		0	0
Beban Luar Biasa		0	0
Surplus (Defisit) Laporan Operasional	D.6	(72.260.236)	(95.479.606)

*Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.

Pangkalpinang, 30 Juni 2026

Mengetahui,
Kuasa Pengguna Anggaran



Rosmala Sari



IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

PENGADILAN TINGGI BANGKA BELITUNG LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 Juni 2026 DAN 30 Juni 2025 (dalam satuan rupiah)

Uraian	Catatan	30 Juni 2026 (dalam rupiah)	30 Juni 2025 (dalam rupiah)
Ekuitas Awal	E.1	14,059,148	26,919,228
Surplus (Defisit) Laporan Operasional	E.2	(85,674,700)	(72,260,236)
Koreksi yang Menambah / Mengurangi Ekuitas	E.3	0	0
Transaksi Antar Entitas	E.4	72,814,620	45,647,942
Kenaikan / Penurunan Ekuitas		(12,860,080)	(26,612,294)
Ekuitas Akhir	E.6	14,059,148	5,197,616

*Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.

Pangkalpinang, 30 Juni 2026
Mengetahui,
Kuasa Pengguna Anggaran



Rosmala Sari



V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. Penjelasan Umum

A.1 Dasar Hukum

- 1.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 2.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- 3.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- 4.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;
- 5.Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-62/PB/2009 tentang Tata cara Penyajian Informasi Pendapatan dan Belanja secara AkruaI pada Laporan Keuangan;
- 6.Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- 7.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- 8.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.05/2013 tentang Bagan Akun Standar;
- 9.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.05/2013 tentang Jurnal Akuntansi Pemerintah Pada Pemerintah Pusat;
- 10.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat. sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 90/PMMK.06/2014;
- 11.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.05/2019 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaI Pada Pemerintah Pusat;
- 12.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2017 tentang Administrasi Pengelolaan Hibah;
- 13.Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-211/PB/2019 tentang Kodefikasi Segmen Akun pada Bagan Akun Standar;
- 14.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.05/2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat;
- 15.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga;
- 16.Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung No. 1330/SEK/SK/XII/2021 mengenai Pedoman Akuntansi Berbasis AkruaI dan Pelaporan Keuangan di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.
- 17.Peraturan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Nomor : PER-8/PB/PB.6/2023 tentang Tatacara Monitoring Kualitas Data Laporan Keuangan, Rekonsiliasi, dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga.
- 18.Peraturan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Nomor : S-52/PB/PB.6/2022 tentang Pedoman Penggunaan Modul Piutang SAKTI bagi Kementerian Lembaga/Negara;
- 19.Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-154/PB/2026 tanggal 03 Juli 2026 hal Pelaksanaan Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Semester I Tahun 2026.

A.2 Profil dan Kebijakan Teknis Pengadilan Tinggi Bangka Belitung

Pengadilan Tinggi Bangka Belitung merupakan satuan kerja (satker) dibawah Mahkamah Agung yang mempunyai tugas dan fungsi: "Memeriksa dan mengadili perkara tingkat banding, mengadili perkara sengketa kewenangan mengadili Pengadilan Tingkat Pertama serta melakukan fungsi pengawasan sebagaimana diatur dalam pasal 53 undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum".

Pengadilan Tinggi Bangka Belitung dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2004 tanggal 06 Juli 2004 yang semula termasuk daerah hukum Pengadilan Tinggi Palembang dialihkan menjadi daerah hukum Pengadilan Tinggi Bangka Belitung. Pengadilan Tinggi Bangka Belitung memiliki wilayah hukum meliputi : Pengadilan Negeri Pangkalpinang, Pengadilan Negeri Sungailiat dan Pengadilan Negeri Tanjungpandan dan Pada Bulan Oktober 2018 berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 14 dan 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan Pengadilan Baru yaitu Pengadilan Negeri Koba, Pengadilan Negeri Mentok.

Tugas Pokok Pengadilan Tinggi Bangka Belitung adalah penyelenggaraan peradilan di tingkat banding. Pengadilan tinggi yang merupakan Pengadilan tingkat Banding dalam mencari keadilan, dalam melaksanakan tugasnya terlepas dari pengaruh pemerintah dan pengaruh luar lainnya.

Visi Pengadilan Tinggi Bangka Belitung adalah Terwujudnya Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Yang Agung, yang bertujuan agar Pengadilan Tinggi Bangka Belitung menjadi lembaga yang dihormati, sebagaimana moto Pengadilan Tinggi Bangka Belitung yaitu "PERISAI" merupakan singkatan dari Persuasif, Edukatif, Implementatif, Solutif, Adaptif, Inspiratif dimana di dalamnya dikelola oleh hakim dan pegawai yang memiliki kemuliaan dan kebesaran serta keluhuran sikap dan jiwa dalam melaksanakan tugas pokoknya, yaitu memutus perkara.

Misi Pengadilan Tinggi Bangka Belitung adalah :

- 1.Menjaga kemandirian Pengadilan Tinggi Bangka Belitung
- 2.Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan
- 3.Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Tinggi Bangka Belitung
- 4.Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Tinggi Bangka Belitung

Untuk mewujudkan Visi dan Misi tersebut Pengadilan Tinggi Bangka Belitung melakukan beberapa langkah-langkah strategis sebagai berikut: Penyusunan rencana dan program pada hakekatnya adalah suatu proses mempersiapkan secara sistematis kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai sasaran/tujuan tertentu.

Sasaran/tujuan mengandung pengertian bahwa perencanaan berkaitan erat dengan perumusan kebijaksanaan. Sehubungan dengan itu perencanaan pada garis besarnya terdiri atas beberapa tahapan yang harus dilalui dan dilaksanakan oleh setiap lembaga/unit organisasi/instansi hingga di daerah sebagai berikut :

- 1.Tahap persiapan rencana yaitu mengidentifikasi, menganalisa dan merumuskan masalah, merumuskan alternatif kebijaksanaan dan menetapkan kebijaksanaan;
- 2.Tahap penjabaran kebijaksanaan ke dalam sasaran dan anggaran yaitu mengkoordinasi penjabaran kebijaksanaan ke dalam sasaran dan anggaran, memantapkan penjabaran sasaran dan anggaran, menetapkan sasaran dan anggaran, menjabarkan satuan ke dalam rancangan satuan, menetapkan rancangan kegiatan, sasaran dan anggaran.

Rencana strategis Pengadilan Tinggi Bangka Belitung ini didorong oleh visi yang jelas dan serangkaian tujuan, prinsip dan target strategis, langkah yang harus diambil dalam menghadapi tantangan dan hambatan dengan penuh keteguhan dan usaha yang terus menerus/berkesinambungan dan strategi yang efektif.

Rencana strategis ini dengan program yang terkait, memberi inisiatif awal dengan berbagai tantangan dan masalah yang akan diatasi. Tantangan utama meliputi : Memelihara kepercayaan masyarakat dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Tinggi Bangka Belitung terhadap sistem peradilan khususnya yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Peradilan.

- Kepercayaan dan keyakinan dalam sistem peradilan di Indonesia pada umumnya telah terkikis disebabkan kelambanan dalam penyelesaian perkara, persepsi tentang korupsi, kolusi dan nepotisme, dan akses terbatasnya pada pelayanan peradilan, solusi efektif untuk masalah tersebut adalah membuat pola dasar dimana kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan bisa kembali pulih;
- Rencana strategis akan memberi prioritas pada sistem dan prosedur peradilan, perbaikan institusi serta sumber daya manusia atau operasional manajemen yang langsung mempengaruhi efisiensi pemberian pelayanan pada peradilan, pada kejujuran dan ketidakberpihakan dari putusan pengadilan. Transparan dan integritas dari proses peradilan dan perlindungan kerahasiaan jika diperlukan;
- Lebih jauh program ini akan menyatukan dan mengkoordinasikan berbagai unsur program melalui pendekatan holistic sehingga perwujudan dari visi dan misi dapat dicapai dengan target secara maksimal. Rencana strategis akan memerlukan sumber daya tetapi dapat dicapai dalam konteks keterbatasan kemampuan sumber daya yang tersedia.

Pengadilan Tinggi Bangka Belitung berusaha untuk memprioritaskan pembangunan sistem peradilan dalam anggaran yang tersedia, disamping itu Pengadilan Tinggi Bangka Belitung akan memobilisasi dan menggunakan secara efisien semua sumber daya internal dan eksternal dalam operasional rutin guna mencapai misi, tujuan dan target yang telah ditetapkan dengan menerapkan Nilai-Nilai Utama Mahkamah Agung RI, yaitu : Kemandirian, Integritas dan Kejujuran, Akuntabilitas, Responsibilitas, Keterbukaan, Ketidakberpihakan, Persamaan yang sama didalam hukum.

A.3 Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahun SEMESTER I TAHUN 2026 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Kantor Pengadilan Tinggi Bangka Belitung. Penyusunan Laporan Keuangan ini sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi dan Surat Dirjen Perbendaharaan Nomor : S-31/PB/PB.6/2023 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Unaudited Tahun Anggaran 2023 serta Pelaksanaan Rekonsiliasi dihasilkan melalui Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) yaitu serangkaian prosedur yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAKTI merupakan integrasi dari berbagai aplikasi yang telah digunakan oleh Satuan Kerja (Satker) yang dirancang berdasarkan proses bisnis SPAN yang baru. Proses bisnis tersebut dituangkan dalam beberapa modul, yaitu : Modul Penganggaran, Modul Komitmen, Modul Pembayaran, Modul Bendahara, Modul Persediaan, Modul Aset Tetap, Modul Pelaporan, dan Modul Administrator. Melalui SAKTI, aplikasi-aplikasi tersebut akan mengakses database yang sama (single database).

Proses migrasi saldo awal dari aplikasi Persediaan, SIMAK dan SAIBA ke aplikasi SAKTI dari satuan kerja yang secara struktural berada dibawah Pengadilan Tinggi Bangka Belitung sudah dilaksanakan sesuai surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-142/PB/2022 Tanggal 14 Juni 2022 dan sudah mengupload Berita Acara Migrasi (BAM) di aplikasi MONSAKTI.

Penyusunan Laporan Keuangan dalam aplikasi SAKTI dengan modul Persediaan, Aset dan GLP (General Lager Pelaporan). SAKTI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan Aset BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

Laporan Keuangan SEMESTER I TAHUN 2026 ini merupakan laporan konsolidasi dari seluruh satuan kerja yang bertanggung jawab atas anggaran yang diberikan, yang secara struktural berada di bawah Pengadilan Tinggi Bangka Belitung.

Pada Bulan Oktober 2019 berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 14 dan 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan Pengadilan Baru, diwilayah Bangka Belitung terdapat penambahan 2 (dua) satker baru yaitu Pengadilan Negeri Koba, Pengadilan Negeri Mentok. Sehingga jumlah satuan kerja di lingkup Wilayah Pengadilan Tinggi Bangka Belitung adalah 6 (Enam) satker.

Dari jumlah tersebut, yang menyampaikan laporan keuangan dan dikonsolidasikan sejumlah satker (100%). Rincian satuan kerja tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

No	Kode Eselon	Uraian Satker	Jumlah Jenis Kewenangan							
			KP		KD		DK		TP	
			M	TM	M	B M	M	BM	M	BM
1.	03	Pengadilan Negeri Pangkal Pinang			✓					
2.	03	Pengadilan Negeri Sungailiat			✓					
3.	03	Pengadilan Negeri Tanjung Pandan			✓					
4.	03	Pengadilan Tinggi Bangka Belitung			✓					
5.	03	Pengadilan Negeri Koba			✓					
6..	03	Pengadilan Negeri Mentok			✓					
JUMLAH					6					

Tabel 3 Jenis Kewenangan Satuan Kerja

Keterangan

M = Menyampaikan LK

BM = Belum Menyampaikan LK

A.4 BASIS AKUNTASI

Kantor Pengadilan Tinggi Bangka Belitung menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.5 DASAR PENGUKURAN

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Kantor dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.6 KEBIJAKAN AKUNTANSI

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2024 (Unaudited) telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kantor Pengadilan Tinggi Bangka Belitung adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan LRA

- Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN)
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

2. Pendapatan LO

- Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.

- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

3. Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

4. Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

5. Aset

- Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non-keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Dalam pengertian aset ini tidak termasuk sumber daya alam seperti hutan, kekayaan di dasar laut, dan kandungan pertambangan. Aset diakui pada saat diterima atau pada saat hak kepemilikan berpindah.
- Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 1. Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 2. Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal.

- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (net realizable value). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah.
- Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d tanggal jatuh tempo	0,5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1.Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan. 2.Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	100%

Tabel 4 Perhitungan Penyisihan Piutang

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbedaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:

Harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian

Harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;

Harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun.
- Aset tetap dilaporkan pada neraca berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
- Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp.1.000.000 (satu juta rupiah);
- Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);

- Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Pemerintah melakukan penilaian kembali (revaluasi) berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2017 tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.06/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara. Revaluasi dilakukan terhadap aset tetap berupa Tanah, Gedung dan Bangunan, serta Jalan, Jaringan, dan Irigasi berupa Jalan Jembatan dan Bangunan Air pada Kementerian Negara/Lembaga sesuai kodifikasi Barang Milik Negara yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2015. Termasuk dalam ruang lingkup objek revaluasi adalah aset tetap pada Kementerian/Lembaga yang sedang dilaksanakan Pemanfaatan. Pelaksanaan penilaian dalam rangka revaluasi dilakukan dengan pendekatan data pasar, pendekatan biaya, dan/atau pendekatan pendapatan oleh Penilai Pemerintah di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan. Revaluasi dilakukan pada tahun 2017 dan 2019. Berdasarkan pertimbangan efisiensi anggaran dan waktu penyelesaian, pelaksanaan penilaian dilakukan dengan survei lapangan untuk objek penilaian berupa Tanah dan tanpa survei lapangan untuk objek penilaian selain Tanah.
- Nilai aset tetap hasil penilaian kembali menjadi nilai perolehan baru dan nilai akumulasi penyusutannya adalah nol. Dalam hal nilai aset tetap hasil revaluasi lebih tinggi dari nilai buku sebelumnya maka selisih tersebut diakui sebagai penambah ekuitas pada Laporan Keuangan. Namun, apabila nilai aset tetap hasil revaluasi lebih rendah dari nilai buku sebelumnya maka selisih tersebut diakui sebagai pengurang ekuitas pada Laporan Keuangan.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
 - Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 1. Tanah;
 2. Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP);
 3. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan
 - Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu;
 - Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
 - Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.
- Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Irigasi dan Jaringan	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

Tabel 5 Masa Manfaat Aset Tetap

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Aset Tak Berwujud, dan Aset Lain-lain.
- Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual;
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat.

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (tahun)
Software Komputer	4
Franchise	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (tahun)
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Semester 1	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70

Tabel 6 Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah. Aset lain-lain disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi Penyusutan.

f. Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

g. Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. Penjelasan atas Pos-Pos Realisasi Anggaran

Selama periode 30 Juni 2026 berjalan, Kantor Wilayah Pengadilan Tinggi Bangka Belitung telah mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini disebabkan karena Revisi Halaman III DIPA dan Pemuktahiran POK. Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja adalah sebagai berikut :

Uraian	30 Juni 2026	
	Anggaran Awal	Anggaran Setelah Revisi
PENDAPATAN		
Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	300,000	300,000
JUMLAH PENDAPATAN	300,000	300,000
BELANJA		
Belanja Barang	240,483,000	240,483,000
JUMLAH BELANJA	240,483,000	240,483,000

Tabel 7 Rincian Anggaran Awal dan Setelah Revisi per 30 Juni 2026

B.1. Pendapatan Negara Bukan Pajak

Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2026 adalah sebesar Rp.300,000,- atau mencapai 38 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp.780.000,-

Keseluruhan Pendapatan Negara Bukan Pajak yang diterima oleh Pengadilan Tinggi Bangka Belitung adalah merupakan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Lainnya.

Rincian Estimasi Pendapatan dan Realisasinya tersaji pada Tabel di bawah :

N o	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1.	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	780.000	300,000	38
	TOTAL PENDAPATAN	780.000	300,000	38

Tabel 8 Rincian Estimasi dan Realisasi PNBP per 30 Juni 2026

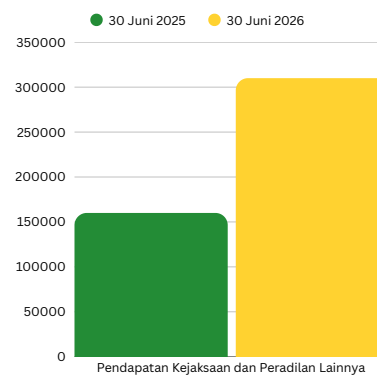
Pendapatan Negara Bukan Pajak : Rp.300.000,- ▼

Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak untuk periode 30 Juni 2026 mengalami kenaikan sebesar (Rp.140.000,-) atau (46,67) persen dibandingkan periode 30 Juni 2025. Hal ini disebabkan adanya kenaikan jumlah penyumpahan advocat sehingga otomatis menaikkan nilai pendapatan pada periode 30 Juni 2026.

Perbandingan realisasi PNBPN per 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025 disajikan dalam tabel berikut :

No	Uraian	30 Juni 2026 (dalam rupiah)	30 Juni 2025 (dalam rupiah)	Perubahan	
				Rp.	%
1.	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	300.000	160.000	(140.000)	(46,67)
	Total Pendapatan	300.000	160.000	(140.000)	(46,67)

Tabel 9 Realisasi PNBPN per 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025



30 Juni 2026	300.000
30 Juni 2025	160.000

Grafik 1 Perbandingan Realisasi PNBPN per 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025

B.2 Belanja

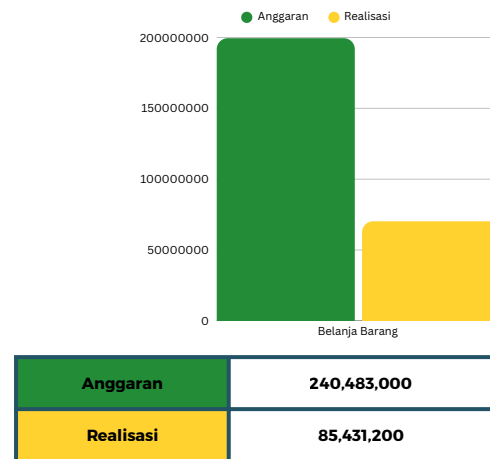
Realisasi Belanja Negara Pengadilan Tinggi Bangka Belitung per 30 Juni 2026 adalah sebesar Rp.85,431,200,- atau sebesar 36 persen dari anggaran senilai Rp.240,483,000,-

**Realisasi Belanja :
Rp.85,431,200**

Uraian	Pagu	Realisasi	%
Belanja Barang	240,483,000	85,431,200	36
Total Belanja Bruto	240,483,000	85,431,200	36
Pengembalian Belanja	0	0	0
Total Belanja Netto	240,483,000	85,431,200	36

Tabel 10 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per 30 Juni 2026

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat pada tabel berikut ini:



Grafik 2 Komposisi Anggaran dan Realisasi Belanja per 30 Juni 2026

Realisasi belanja negara mengalami kenaikan sebesar (Rp.15.160.120,-) atau sebesar (17,75) persen dari realisasi tahun lalu pada periode yang sama. Kenaikan tersebut disebabkan karena tambahan pagu anggaran Tahun 2026 dan Anggaran Rapat Koordinasi Percepatan Penyelesaian Perkara telah direalisasikan.

Perbandingan realisasi belanja 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

Uraian	30 Juni 2026 (dalam rupiah)	30 Juni 2025 (dalam rupiah)	Perubahan	
			Rp.	%
Belanja Pegawai	0	0	0	0
Belanja Barang	85,431,200	70,271,080	15,160,120	17,75
Belanja Modal	0	0	0	0
Total Belanja	85,431,200	70,271,080	15160120	17,75

Tabel 11 Perbandingan Realisasi Belanja per 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025

B.2.1 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang pada lingkup Wilayah Pengadilan Tinggi Bangka Belitung per 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025 adalah sebesar Rp.85,431,200,- dan Rp.70,271,080,-

Realisasi Belanja Barang per 30 Juni 2026 mengalami kenaikan sebesar Rp.15,160,120,- atau sebesar 17,75 persen dibandingkan Realisasi Belanja Barang per 30 Juni 2025. Hal ini disebabkan kenaikan pagu anggaran tahun 2026, realisasi paling besar disebabkan oleh Realisasi belanja bahan dan perjalanan dinas Rapat Koordinasi Percepatan Penyelesaian Perkara sebesar (98,36) persen dibandingkan 30 Juni 2025.

Rincian Belanja Barang dapat dilihat pada tabel di bawah:

Realisasi Belanja Barang :
Rp.85,431,200,-

Uraian	30 Juni 2026 (dalam rupiah)	30 Juni 2025 (dalam rupiah)	Perubahan	
			Rp.	%
Belanja Operasional Barang	17,316,500	17,080,000	236.500	73,22
Belanja Barang Non Operasional	11,630,00	2,700,000	8.930.000	76,78
Belanja Persediaan Barang	7,017,000	4,842,000	2.175.000	30,99
Belanja Perjalanan Dinas	124,870,300	72,350,920	52.519.380	42,06
Total Belanja Bruto	85,431,200	71,586,900	13.844.300	16,21
Pengembalian Belanja	0	1,315,820	(1,315,820)	0
Total Belanja Neto	85,431,200	71,586,900	77.705.180	90,96

Tabel 12 Rincian Belanja Barang per 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025

C. Penjelasan atas Pos-Pos Neraca

C.1 Aset Lancar

Aset Lancar:
Rp.16,714,148,-

Persediaan per 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025 masing-masing adalah sebesar Rp.16,714,148,- dan Rp.30,918,728,-. Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (supplies) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Rincian Aset Lancar per 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025 adalah sebagai berikut:

No	Uraian	30 Juni 2026 (dalam rupiah)	31 Desember 2025 (dalam rupiah)
1.	Persediaan	16,714,148	30,918,728
	Total Aset Lancar	16,714,148	30,918,728

Tabel 13 Rincian Aset Lancar per 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025

C.1.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara Pengeluaran :
Rp.5.000.000,-

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025 masing-masing adalah sebesar Rp.5.000.000,- dan Rp.0,- yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan dibawah tanggungjawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari Uang Persediaan yang belum dipertanggungjawabkan atau disetorkan kembali ke kas negara per tanggalneraca.

Rincian Kas Di Bendahara Pengeluaran per 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Jenis	30 Juni 2025 (dalam rupiah)	31 Desember 2024 (dalam rupiah)
1.	Pengadilan Tinggi Bangka Belitung	Tunai	5.000.000	0
		Kwitansi UP	0	0
		Bank	0	0

Tabel 14 Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran per 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025

Rincian uang tunai di Brankas Bendahara Pengeluaran sebesar Rp.5.000.000,- ,Kwitansi UP yang belum dipertanggungjawabkan sebesar Rp.0,-, Saldo Bank direkening Bendahara sebesar Rp.0,-

C.1.2 Persediaan

Persediaan :
Rp.16,714,148,- ▼

Persediaan per 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025 masing-masing adalah sebesar Rp.16,714,148,- dan Rp.30,918,728,-. Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (supplies) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Rincian Persediaan per 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

No	Uraian	30 Juni 2026 (dalam rupiah)	31 Desember 2025 (dalam rupiah)
1.	Barang Konsumsi	16,714,148	30,918,728
	Total	16,714,148	30,918,728

Tabel 15 Rincian Persediaan per 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025

Semua persediaan sampai dengan tanggal akhir pelaporan berada dalam kondisi baik sesuai dengan Berita Acara Opname Fisik Persediaan Satuan Kerja Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Nomor : 1916/SEK/PT/W7-U/PL-1-2/VI/2026 tanggal 30 Juni 2026.

C.2 Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban Jangka Pendek :
Rp.7,655,000,- ▲

Nilai Kewajiban Jangka Pendek per 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025 masing-masing adalah sebesar Rp.7,655,000,- dan Rp.3,999,500,-

Kewajiban Jangka Pendek merupakan kelompok kewajiban yang diharapkan segera diselesaikan dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Rincian Kewajiban Jangka Pendek pada lingkup Wilayah Pengadilan Tinggi Bangka Belitung per 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025 disajikan pada tabel di bawah :

No	Uraian	30 Juni 2026 (dalam rupiah)	31 Desember 2025 (dalam rupiah)
1.	Utang Kepada Pihak Ketiga	0	3,999,500
2.	Utang yang Belum Ditagihkan	2,655,000	0
3.	Uang Muka dari KPPN	5.000.000	0
	Total	7.655.000	3,999,500

Tabel 16 Rincian Kewajiban Jangka Pendek per 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025

C.2.1 Utang kepada Pihak Ketiga

Utang kepada Pihak Ketiga:
Rp.0,-

Saldo Utang kepada Pihak Ketiga per 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025 masing-masing adalah sebesar Rp.0,- dan Rp.3,999,500.

Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan.

Adapun Perbandingan Utang Pihak Ketiga pada lingkup Wilayah Pengadilan Tinggi Bangka Belitung per 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025 sebagai berikut:

No	Uraian	30 Juni 2026 (dalam rupiah)	31 Desember 2025 (dalam rupiah)
1.	Belanja Barang yang masih harus dibayar	0	3,999,500
	TOTAL	0	3,999,500

Tabel 17 :Perbandingan Utang kepada Pihak Ketiga per 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025

C.2.2 Utang Yang Belum Ditagihkan

Utang yang Belum
Ditagihkan : Rp.2,655,000,-

Saldo Utang Yang Belum Ditagihkan per 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025 masing-masing adalah sebesar Rp.1.600.000- dan Rp.0.

Utang yang Belum Ditagihkan merupakan utang yang timbul karena Kwitansi GUP yang belum di SPJkan.

Adapun Rincian Utang yang belum ditagihkan pada lingkup Wilayah Pengadilan Tinggi Bangka Belitung per 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2024 sebagai berikut :

No.	Uraian	30 Juni 2026 (dalam rupiah)	31 Desember 2025 (dalam rupiah)
1.	Utang Yang Belum Diterima Tagihannya	2,655,000	0
	TOTAL	2,655,000	0

Tabel 18 Perbandingan Utang yang Belum Diterima Tagihannya per 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025

C.2.3 Uang Muka dari KPPN

Uang Muka dari KPPN :
Rp.5.000.000,-

Saldo Uang Muka dari KPPN per 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025 masing-masing adalah sebesar Rp.5.000.000,- dan Rp.0-. Uang Muka dari KPPN merupakan uang persediaan (UP) atau tambahan uang persediaan(TUP) diberikan KPPN sebagai uang muka kerja yang masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan. Uang Muka dari KPPN adalah akun pasangan dari Kas di Bendahara Pengeluaran yang ada di kelompok akun Aset Lancar.

C.3 Ekuitas

**Ekuitas :
Rp.14,059,148,-**

Ekuitas per 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025 adalah masing-masing sebesar Rp.14,059,148,- dan Rp.26,919,228,-. Ekuitas adalah merupakan kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Penjelasan Lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

Rincian Nilai Ekuitas pada lingkup Wilayah Pengadilan Tinggi Bangka Belitung per 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025 disajikan pada tabel di bawah :

No	Uraian	30 Juni 2026 (dalam rupiah)	31 Desember 2025 (dalam rupiah)
1.	Ekuitas	14,059,148	26,919,228
	Total	14,059,148	26,919,228

Tabel 19 Perbandingan Ekuitas per 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025

D. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional

D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025 adalah sebesar Rp.300.000,- dan Rp.160.000,-

Rincian Realisasi Pendapatan PNBPN seperti berikut ini:

Uraian	Estimasi Pendapatan (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	780.000	300.000	38,46
Total Pendapatan	780.000	300.000	38,46

Tabel 20 Rincian Realisasi Pendapatan PNBPN per 30 Juni 2026

Perbandingan realisasi PNBPN per 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025 disajikan dalam tabel dibawah ini :

No	Uraian	30 Juni 2026 (dalam rupiah)	30 Juni 2025 (dalam rupiah)	Perubahan	
				Rp.	%
1.	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	300.000	160.000	140.000	46,67
	Total Pendapatan	300.000	160.000	140.000	46,67

Tabel 21 Perbandingan Realisasi PNBPN per 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025

D.2 Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025 adalah masing-masing sebesar Rp.8,905,000,- dan Rp.8,891,156. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan;

Beban Persediaan pada 30 Juni 2026 mengalami kenaikan sebesar Rp.13.844,- atau 0,16 persen dibandingkan dengan 30 Juni 2025 disebabkan oleh naiknya pagu anggaran Tahun 2026, sehingga otomatis menaikkan nilai beban persediaan periode 30 Juni 2026.

Rincian Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025 disajikan dalam tabel dibawah ini :

**Pendapatan PNBPN :
Rp.300.000,-**

**Beban Persediaan :
Rp.8,905,000,-**

Uraian	30 Juni 2026 (dalam rupiah)	30 Juni 2025 (dalam rupiah)	Perubahan	
			Naik/Turun (Rp)	%
Beban Persediaan Konsumsi	8,905,000	8.891.156	13.844	0,16
Total Beban Persediaan	8,905,000	8.891.156	13.844	0,16

Tabel 22 Rincian beban persediaan per 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025

D.3 Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025 adalah masing-masing sebesar Rp.27,602,000,- dan Rp.16.280.000,- Beban Barang dan Jasa adalah konsumsi atas barang-barang dan jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas.

Beban Barang dan Jasa 30 Juni 2026 mengalami kenaikan sebesar Rp.11.322.000,- atau 69.54 persen dibandingkan dengan 30 Juni 2025 disebabkan kenaikan pagu anggaran di Tahun 2026.

Rincian Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025 adalah sebagai berikut:

Uraian	30 Juni 2026 (dalam rupiah)	30 Juni 2025 (dalam rupiah)	Perubahan	
			Naik/Turun (Rp)	%
Beban Bahan	12,580,000	2.700.000	9.880.000	365,92
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Surat	15,022,000	13.580.000	3.176.000	23,38
Total Beban Jasa	27,602,000	16.280.000	11.322.000	69,54

Tabel 23 Rincian Beban Barang dan Jasa per 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025

D.4 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025 adalah masing-masing sebesar Rp.49,467,700,- dan Rp.47.249.080- Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Beban Perjalanan Dinas Per 30 Juni 2026 mengalami kenaikan sebesar Rp.2.218.620,- atau 4,69 persen dibandingkan per 30 Juni 2025 dikarenakan anggaran perjalanan dinas rapat koordinasi sudah untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2026 telah direalisasikan .

Beban Barang dan Jasa :
Rp.27,602,000,- ▲

Beban Perjalanan Dinas :
Rp.49,467,700,- ▲

Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025 adalah sebagai berikut:

Uraian	30 Juni 2026 (dalam rupiah)	30 Juni 2025 (dalam rupiah)	Perubahan	
			Naik/Turun (Rp)	%
Beban Perjalanan Biasa	46,267,700	45,169,080	1.098.620	2,43
Beban Perjalanan Dinas dalam Kota	3,200,000	2,080,000	1.120.000	53,84
Total Beban Perjalanan Dinas	49,467,700	46,964,900	2.218.620	4,69

Tabel 24 Rincian Beban Perjalanan Dinas per 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025.

D.5 Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional

Pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional per 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025 adalah sebagai berikut:

Surplus / Defisit dari
Kegiatan Non Operasional
:0,-

Uraian	30 Juni 2026 (dalam rupiah)	30 Juni 2025 (dalam rupiah)	Perubahan	
			Naik / Turun (Rp)	%
Surplus / Defisit Pelepasan Aset Non Lancar	0	0	0	-
Surplus/Defisit Kegiatan Non Operasional Lain	0	0	0	-
Surplus/ Defisit LO dari Kegiatan Non Operasional	0	0	0	-

Tabel 25 Rincian Kegiatan Non Operasional 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025

Dari tabel diatas terdapat dapat dilihat bahwa per 30 Juni 2026 tidak terdapat pendapatan dari kegiatan non operasinal lainnya dan beban dari kegiatan non operasional lainnya.

D.6 Surplus /Defisit Laporan Operasional

Surplus/Defisit Laporan Operasional periode 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025 adalah masing-masing sebesar (Rp.72.260.236,-) dan (Rp.95.479.606,-).

Surplus/Defisit Laporan
Operasional :
(Rp.72.260.236,-) ▲

E. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Ekuitas

E.1 Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2026 dan 1 Januari 2025 adalah masing-masing sebesar Rp.26,919,228,- dan Rp.31.809.910,-

Ekuitas Awal :
Rp.26,919,228,- ▲

E.2 Surplus (Defisit) LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025 adalah sebesar (Rp.85,674,700) dan (Rp.72.260.236,-) . Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

Surplus(defisit) LO:
(Rp.85,674,700) ▲

E.3 Koreksi yang Menambah / Mengurangi Ekuitas

Koreksi yang menambah / mengurangi ekuitas per 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025 masing-masing adalah sebesar Rp.0,-

Koreksi yang Menambah /
Mengurangi Ekuitas: Rp.0,-

E.4 Penyesuaian Nilai Aset

Penyesuaian Nilai Aset per 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025 masing-masing adalah sebesar Rp.0 dan Rp.0. Penyesuaian nilai aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan terakhir.

Penyesuaian Nilai Aset :
Rp.0,-

E.5 Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025 adalah masing-masing sebesar Rp.72,814,620,- dan Rp.45.647.942,-. Transaksi Antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BU.

Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari :

Ditagihkan ke Entitas Lain	85,431,200
Diterima dari Entitas Lain	300,000
Transfer Keluar	12,316,580
Jumlah	98.047.780

Tabel 26 Tansaksi Antar Entitas

E.5.1 Diterima / Ditagihkan dari Entitas Lain

Diterima dari Entitas Lain / Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 30 Juni 2026, Diterima Dari Entitas Lainnya sebesar (Rp.300.000,-) sedangkan Ditagihkan Ke Entitas Lainnya sebesar Rp.85,431,200,-

E.5.2 Transfer Masuk/ Transfer Keluar

Transfer Masuk / Transfer Keluar merupakan perpindahan aset / kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL dan antara KL dengan BA-BUN. Transfer Masuk sampai dengan 30 Juni 2026 sebesar Rp.0,- dan Transfer Keluar sampai dengan tanggal 30 Juni 2026 sebesar Rp.12,316,580,-

Rincian Transfer Keluar Pengadilan Tinggi Bangka Belitung sebagai berikut:

No	Satker Pengirim	Satker Penerima		Kode Akun	Nama Akun	Transfer Masuk
1.	663404	099234	PENGADILAN NEGERI PANGKAL PINANG	117111	Barang Konsumsi	5.863.690
2.	663404	099235	PENGADILAN NEGERI SUNGAI LIAT	137111	Barang Konsumsi	2.108.338
3.	663404	400601	PENGADILAN NEGERI TANJUNG PANDAN	137111	Barang Konsumsi	1.830.838
4.	663404	402020	PENGADILAN NEGERI Koba	137111	Barang Konsumsi	1.223.668
5.	663404	402021	PENGADILAN NEGERI MENTOK	137111	Barang Konsumsi	1.290.046
Total Transfer Keluar per 30 Juni 2026						12,316,580

Tabel 27 Rincian Transfer Keluar 30 Juni 2026

E.6 Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025 adalah masing-masing sebesar Rp.14,059,148,- dan Rp. 5.197.616,-

Kenaikan/penurunan ekuitas merupakan penjumlahan selisih antara surplus/ defisit LO dan transaksi antar entitas.

Sehingga nilai kenaikan/penurunan ekuitas akhir pada tanggal 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025 adalah masing-masing sebesar (Rp.12,860,080,-) dan (Rp.26,612,294,-).

**Ekuitas Akhir :
Rp.14,059,148,-**

F. Pengungkapan Penting Lainnya

Kejadian Penting Setelah Tanggal Neraca

Tidak ada kejadian penting setelah tanggal neraca.

F.1 Pengungkapan Lain-Lain

Laporan Keuangan Tingkat UAKPA SEMESTER I TAHUN 2026 ini disusun berdasarkan Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-154/PB/2026 tanggal 04 Juli 2026 hal Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga SEMESTER I TAHUN 2026, dengan memperhatikan hal-hal berikut ini:

- Penyusunan Laporan Keuangan Tingkat UAKPA SEMESTER I TAHUN 2026 Pengadilan Tinggi Bangka Belitung mempedomani Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi dan Peraturan Direjen Perbendaharaan Nomor : PER-8/PB/2023 tgl 8 Sep 2023 tentang Tata Cara Monitoring Kualitas Data, Rekonsiliasi, dan Penyampaian Laporan Keuangan pada Entitas K/L.

F.2 Temuan dan Tindak Lanjut Temuan BPK

Tidak ada temuan BPK baik pada semester maupun tahun anggaran yang lalu. Rencana tindak lanjut dan monitoring penyelesaian temuan BPK ini terdapat dalam lampiran pendukung laporan keuangan ini.

F.3 Pengungkapan Capaian Rincian Output Per Fungsi APBN

Penyusunan Belanja Pegawai Pemerintah Pusat yang dirinci menurut fungsi dilakukan untuk melakukan analisis, yaitu mengetahui fungsi-fungsi mana yang menyerap alokasi anggaran paling banyak maupun yang menyerap alokasi anggaran paling sedikit. Klasifikasi menurut fungsi yang diterapkan dalam sistem penganggaran di Indonesia, mengacu pada Classification of the Functions of Government (COFOG) yang disusun oleh United Nations Development Programme Monetary Fund (IMF), dengan sedikit modifikasi berupa pemisahan fungsi agama dari fungsi rekreasi, budaya, dan agama (recreation, culture, and religion). Dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Keuangan Negara, Klasifikasi Fungsi dirinci ke dalam sebelas fungsi sebagai berikut :

1. Pelayanan Umum
2. Pertahanan
3. Ketertiban dan keamanan
4. Ekonomi
5. Lingkungan hidup
6. Perumahan dan fasilitas umum
7. Kesehatan
8. Pariwisata dan budaya
9. Agama
10. Pendidikan
11. Perlindungan sosial

Capaian Rincian Output menurut klasifikasi fungsi yang telah dicapai dalam pelaksanaan APBN 30 Juni 2026 pada UAPPAW Pengadilan Tinggi Bangka Belitung antara lain sebagai berikut:

Laporan Kinerja Satuan Kerja 30 Juni 2026

Kementerian/Lembaga : 005 Mahkamah Agung RI
 Unit Organisasi : 03 Badan Peradilan Umum MA RI
 Satuan Kerja : 663404 Pengadilan Tinggi Bangka Belitung
 Fungsi : 03 Ketertiban dan Keamanan
 Sub Fungsi : 03.04 Peradilan
 Program : 005.03.BF Program Penegakan dan Pelayanan Hukum
 Lokasi : Pangkalpinang

Kode	Kegiatan	Belanja			Keluaran				Keterangan
		Anggaran	Realisasi	%	T a r g e t	R e a l i s a s i	Satuan	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1049. AEA. 003	Koordinasi Percepatan Penyelesaian Perkara di Lingkungan Peradilan Umum	111.318.000	0	0	1	0	Kegiatan	0,4	Kegiatan Rakor baru akan dilaksanakan di bulan juli 2025 setelah anggaran blokir dibuka
1049. AEA. 001	Pembinaan dan Pengawasan Aparatur Tenaga Teknis di Lingkungan Peradilan Umum	60.450.000	41.937.500	72	6	4	Kegiatan	69,38	Kegiatan Binwas untuk Semester I sudah selesai dilaksanakan
1049. BCA. U02	Perkara Pidana Korupsi yang Diselesaikan Ditingkat Banding di wilayah Barat	10.650.000	3.537.500	49,66	15	6	Perkara	33,22	Belum ada perkara putus untuk pidana tipikor, realisasi berupa perpanjangan penahanan dan ATK
1049. BCA. U01	Perkara Pidana Yang Diselesaikan di Tingkat Banding di wilayah Barat	43.415.000	24.946.000	57,46	95	70	Perkara	57,46	Realisasi sudah sesuai
		225.833.000	70.421.000						

Tabel 28 Laporan Kinerja Satker Pengadilan Tinggi Bangka Belitung 30 Juni 2026

F.4 Pengungkapan Prgoram Prioritas Nasional

Berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 30 Juni 2026 yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintah periode 30 Juni 2026, pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung tidak terdapat Alokasi Anggaran untuk Prioritas Nasional (PN).

F.5 Pengungkapan Pengelolaan Uang Titipan Pihak Ketiga

F.5.1 Pengelolaan Keuangan Perkara dan Uang Titipan Pihak Ketiga pada Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan Dibawahnya :

Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya sebagai Lembaga Yudikatif mengelola sumber pembiayaan yang berasal dari bagian anggaran pada APBN dan sumber lain untuk pembiayaan perkara perdata baik di lingkungan peradilan umum, peradilan agama, maupun penyelesaian perkara tata usaha negara dari pihak berperkara yang disebut sebagai biaya proses penyelesaian perkara dan/atau biaya perkara. Di samping itu, pada pengadilan juga terdapat uang/barang dengan status disimpan/tersimpan dan/atau dititipkan.

Yang dimaksud dengan biaya proses penyelesaian perkara dan/atau biaya perkara adalah seluruh pengeluaran pada perkara perdata atau penyelesaian perkara tata usaha negara yang dibebankan ke pihak berperkara (penggugat/pemohon) yang terdiri dari:

- Biaya kepaniteraan (griffier kosten) yang lebih dikenal sebagai hak-hak kepaniteraan yang merupakan pungutan atas layanan/jasa pengadilan yang disetor ke kas Negara sebagai PNPB dengan jenis dan tarifnya telah diatur melalui Peraturan Pemerintah.
- Ongkos perkara/biaya proses yang merupakan pengeluaran yang diperlukan untuk penyelenggaraan peradilan yang meliputi antara lain biaya-biaya panggilan, pemberitahuan, pelaksanaan sita, pemeriksaan setempat, sumpah, penerjemah, dan biaya-biaya lain yang berkaitan langsung dengan penyelesaian perkara tersebut.

Hal ini merupakan konsekuensi logis dan yuridis bahwa dalam perkara perdata dan perkara tata usaha negara, biaya perkara dibebankan kepada para pihak berperkara, yang pada proses awal dibebankan kepada pihak yang mengajukan gugatan/permohonan, termasuk pihak-pihak yang mengajukan upaya hukum baik upaya hukum Banding, Kasasi maupun Peninjauan Kembali karenanya negara tidak mengalokasikan anggarannya atas biaya perkara perdata pada APBN melalui DIPA, kecuali atas perkara prodeo bagi mereka yang tidak mampu secara ekonomi dan/atau dalam perkara gugatan di Pengadilan Hubungan Industrial dengan nilai gugatan dibawah 150 juta.

Selain biaya proses penyelesaian perkara dan/atau biaya perkara pada pengadilan juga terdapat uang dan/atau barang dengan status disimpan/tersimpan dan/atau dititipkan selama proses sengketa dan/atau proses perkara yaitu uang konsinyasi, uang atas barang bukti perkara dan uang atas jaminan penangguhan penahanan yang dititipkan dan/atau disimpan di kepaniteraan dan juga uang-uang lain yang tersimpan di pengadilan antara lain uang sisa hasil pelaksanaan lelang aset debitur (pihak yang berhutang) yang dijaminakan setelah dibayarkan seluruh kewajiban pihak debitur kepada kreditur (pihak yang berpiutang/ yang mengajukan klaim) masih terdapat sisa yang belum dikembalikan kepada debitur, dan/atau uang lainnya yang masih terkait/berhubungan dengan perkara.

Biaya proses penyelesaian perkara atau biaya perkara dalam pedoman ini disebut sebagai uang titipan pihak ketiga dan uang dan/atau barang dengan status disimpan/tersimpan dan/atau dititipkan selama proses sengketa dan/atau proses perkara di kepaniteraan peradilan termasuk uang lainnya yang masih terkait/berhubungan dengan perkara disebut sebagai uang titipan pihak ketiga lainnya.

Uang titipan pihak ketiga dipertanggungjawabkan kepada pihak-pihak yang berperkara dengan ditetapkannya besaran biaya proses pada putusan dan dicatat pada Buku Keuangan Perkara, dikelola secara efektif, efisien, transparan, serta diungkapkan dalam CaLK Wilayah Pengadilan Tinggi Bangka Belitung. Sebagai wujud dari akuntabilitas, transparansi dan asas full disclosure atas pelaporan keuangan Mahkamah Agung Republik Indonesia maka terhadap uang titipan pihak ketiga lainnya dicatat pada Buku Keuangan Perkara Lainnya serta diungkapkan dalam CaLK Wilayah Pengadilan Tinggi Bangka Belitung.

Sebagaimana Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 657/SEK/SK/X/2018 tentang Pedoman Akuntansi Berbasis Akrua dan Pelaporan Keuangan dilingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya khususnya pada Kebijakan Pengungkapan Pengelolaan Uang Titipan Pihak Ketiga, diberikan pengungkapan sebagai berikut:

Informasi mengenai saldo akhir biaya perkara untuk periode yang berakhir per 30 Juni 2026 yaitu sebesar Rp.150.000,- dengan rincian saldo uang perkara di rekening koran per 30 Juni 2026 adalah sebesar Rp.0,- sedangkan saldo biaya perkara di brankas per 30 Juni 2026 adalah sebesar Rp.150.000,-

TABEL 29 REKAPITULASI LAPORAN KEUANGAN PERKARA PENGADILAN TINGGI BANGKA BELITUNG PER 30 Juni 2026

N o.	Nama Satker	Uraian	Keuangan Perkara				Tempat Penyimpanan Uang	
			Sisa Awal	Masuk	Keluar	Sisa	Dalam Bank	Dalam Brankas
1.	PT BANGKA BELITUNG	Biaya Perkara	450.000	1.950.000	2.250.000	150.000	-	150.000
		Biaya Eksekusi	-	-	-	-	-	-
		Konsinyasi	-	-	-	-	-	-
	TOTAL		450.000	1.950.000	2.250.000	150.000	-	150.000

F.7 Revisi DIPA

Sampai dengan 30 Juni 2026 satuan kerja di Wilayah Pengadilan Tinggi Bangka Belitung sudah melakukan beberapa kali revisi dengan rincian sebagai berikut :

PENGADILAN TINGGI BANGKA BELITUNG

Pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung sudah melakukan 4 (empat) kali revisi DIPA yaitu :

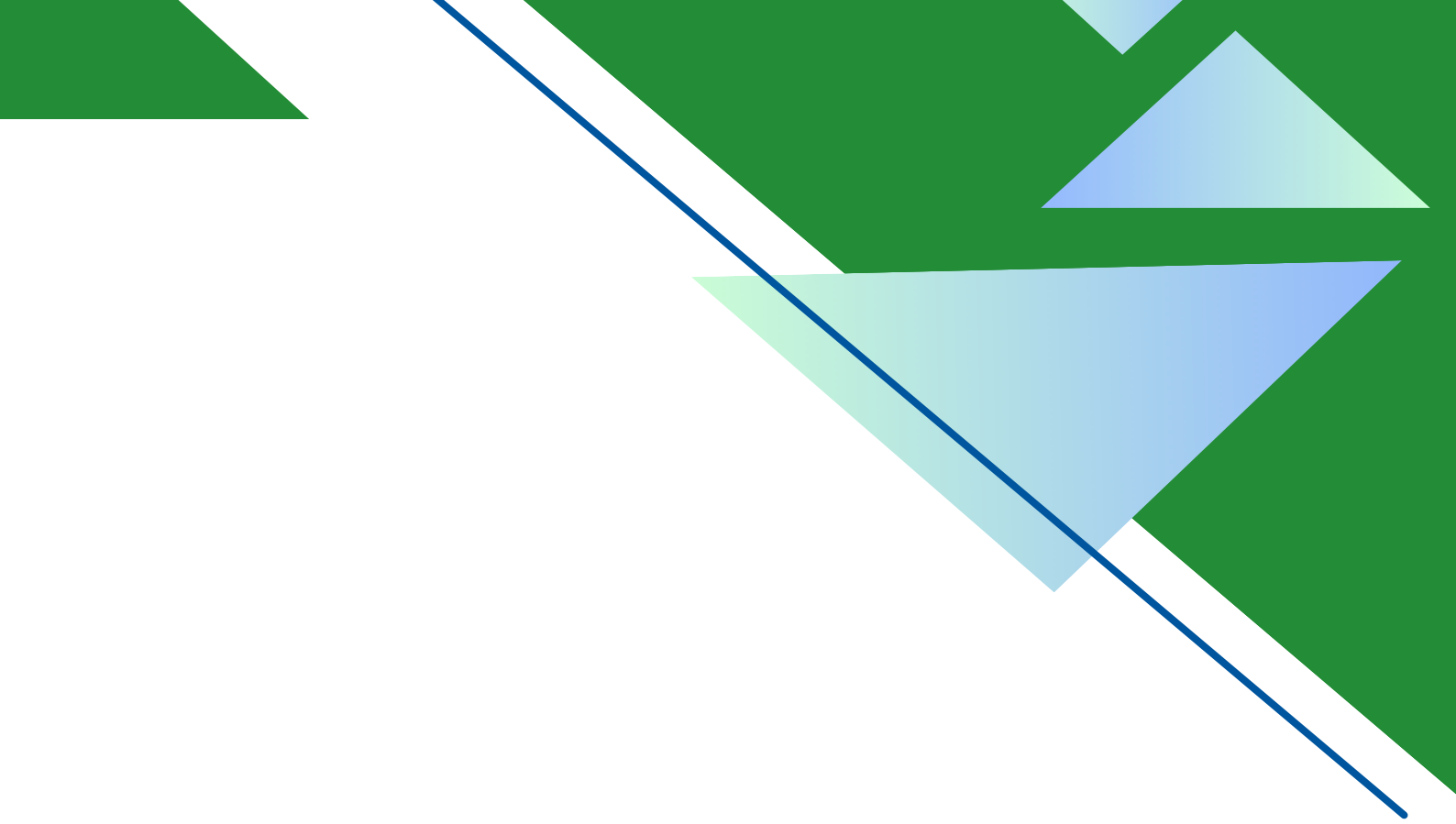
1. Revisi I tanggal 24 Desember 2026 tentang Direktif Presiden ;
2. Revisi II tanggal 10 Februari 2026 tentang Revisi Halaman III DIPA + POK;
3. Revisi III tanggal 10 April 2026 tentang Revisi Halaman III DIPA +POK;
4. Revisi IV tanggal 09 Juni 2026 tentang Revisi POK.

F.8 Penandatanganan Pejabat Perbendaharaan

Pada periode Laporan Keuangan Semester I Tahun 2026 terdapat perubahan Pejabat Perbendaharaan, yaitu penggantian KPA di Pengadilan Tinggi Bangka Belitung , sehingga susunan pejabat perbendaharaan Pengadilan Tinggi Bangka Belitung menjadi sebagaimana tabel berikut:

Satker	Jabatan	Semula	Menjadi
Pengadilan Tinggi Bangka Belitung	Kuasa Pengguna Anggaran	Luki Pudi Asmara	Rosmala Sari
	Pejabat Pembuat Komitmen	Fitriyanti Utari	Fitriyanti Utari
	PPSPM	Nur Kamalia	Nur Kamalia
	Bendahara	Dessy Triastuti	Dessy Triastuti

Tabel 30 Penandatanganan Pejabat Perbendaharaan



LAMPIRAN PENDUKUNG



Rincian Nilai Perolehan, Akumulasi Penyusutan dan Nilai Buku Aset Tetap

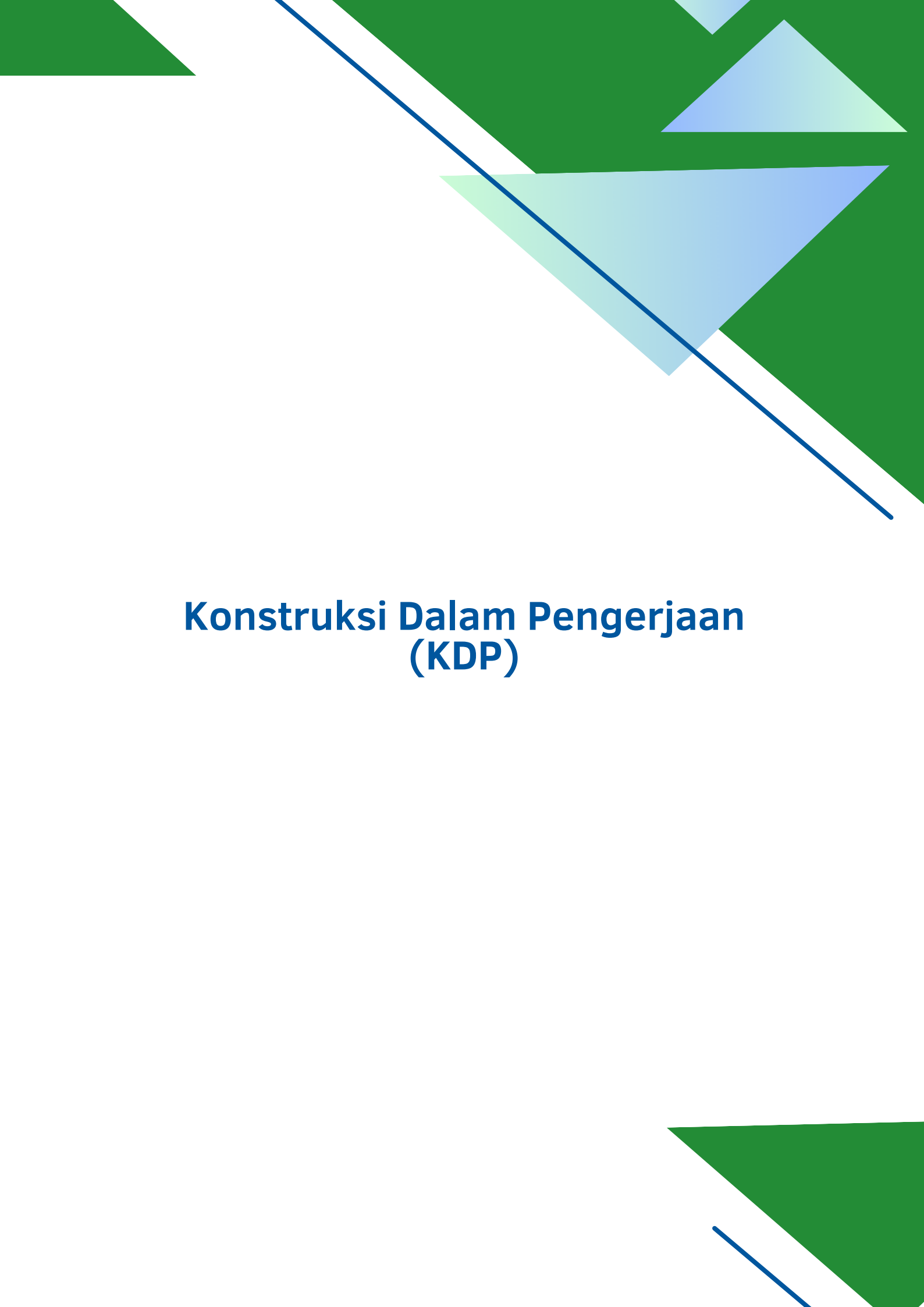
Tabel 31 Rincian Nilai Perolehan, Akumulasi Penyusutan, dan Nilai Buku Aset Tetap untuk Periode yang Berakhir pada 30 Juni 2026

Kode							
Aset Tetap							
Kuantitas							
Nilai Perolehan							
Saldo Awal Akumulasi Penyusutan							
Beban Penyusutan Per 30 Juni 2026							
Total Akumulasi Penyusutan per 30 Juni 2026							
Nilai Buku							

Pangkalpinang, 30 Juni 2026
 Kuasa Pengguna Anggaran



Rosmala Sari



Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

Tabel 32 Rincian KDP untuk Periode yang Berakhir pada 30 Juni 2026

No	Kode Satker	Nama Satker	Kode Barang	Tanggal Mulai Kontrak	Tanggal Akhir Kontrak	Nilai Kontrak (Rp)	Nilai KDP	% Penyelesaian	Dilanjutk an	Dihentikan Sementara	Dihentikan Permanen

Pangkalpinang, 30 Juni 2026
Kuasa Pengguna Anggaran



Rosmala Sari



HIBAH

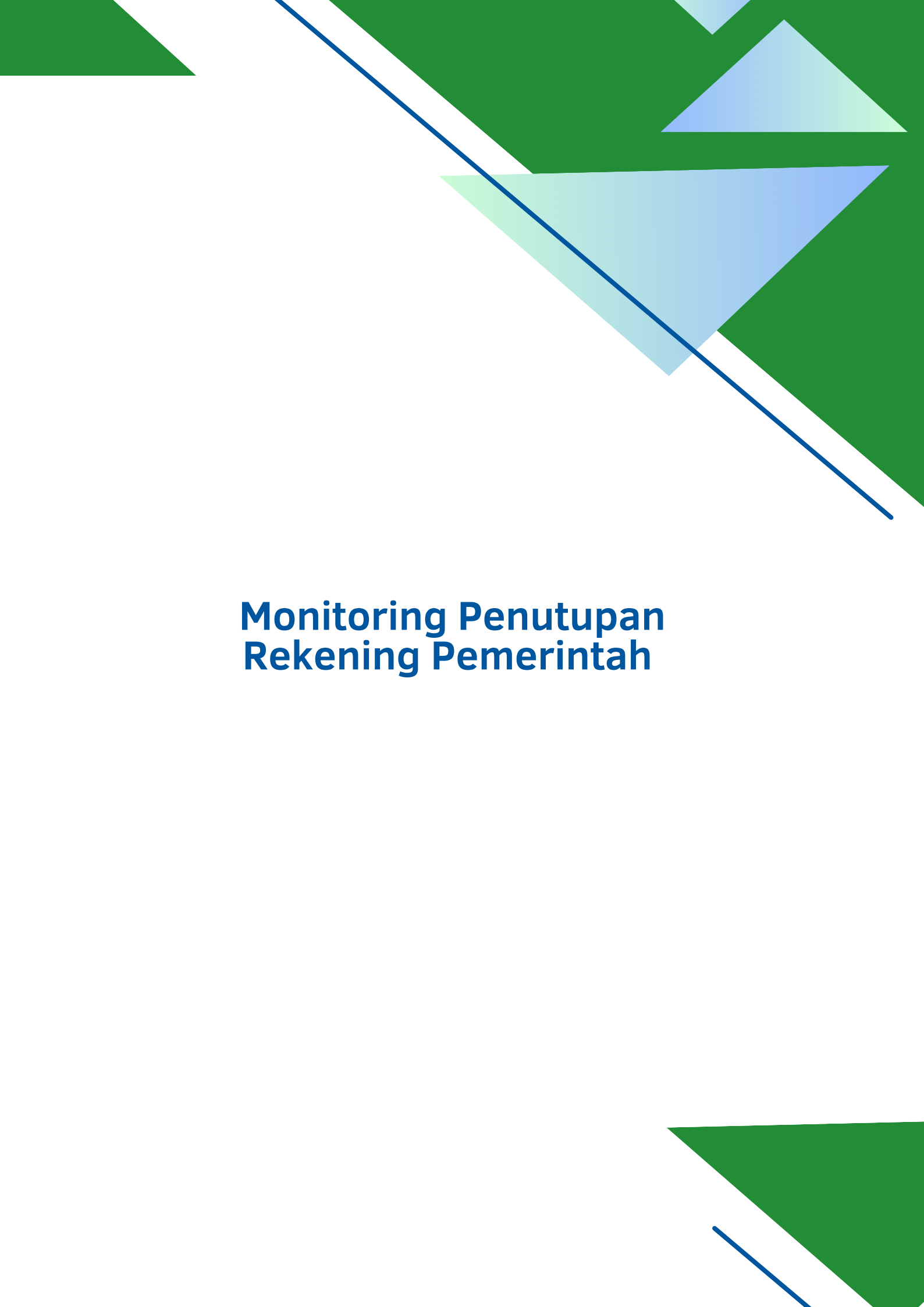
Tabel 33 Rincian Hibah Langsung untuk Periode yang Berakhir pada 30 Juni 2026

No	Kode Satker	Nama Satker	Nomor Register	Bentuk Hibah	Nilai Hibah	Keterangan
-	-	-	-	-	-	-

Pangkalpinang, 30 Juni 2026
Kuasa Pengguna Anggaran



Rosmala Sari



Monitoring Penutupan Rekening Pemerintah

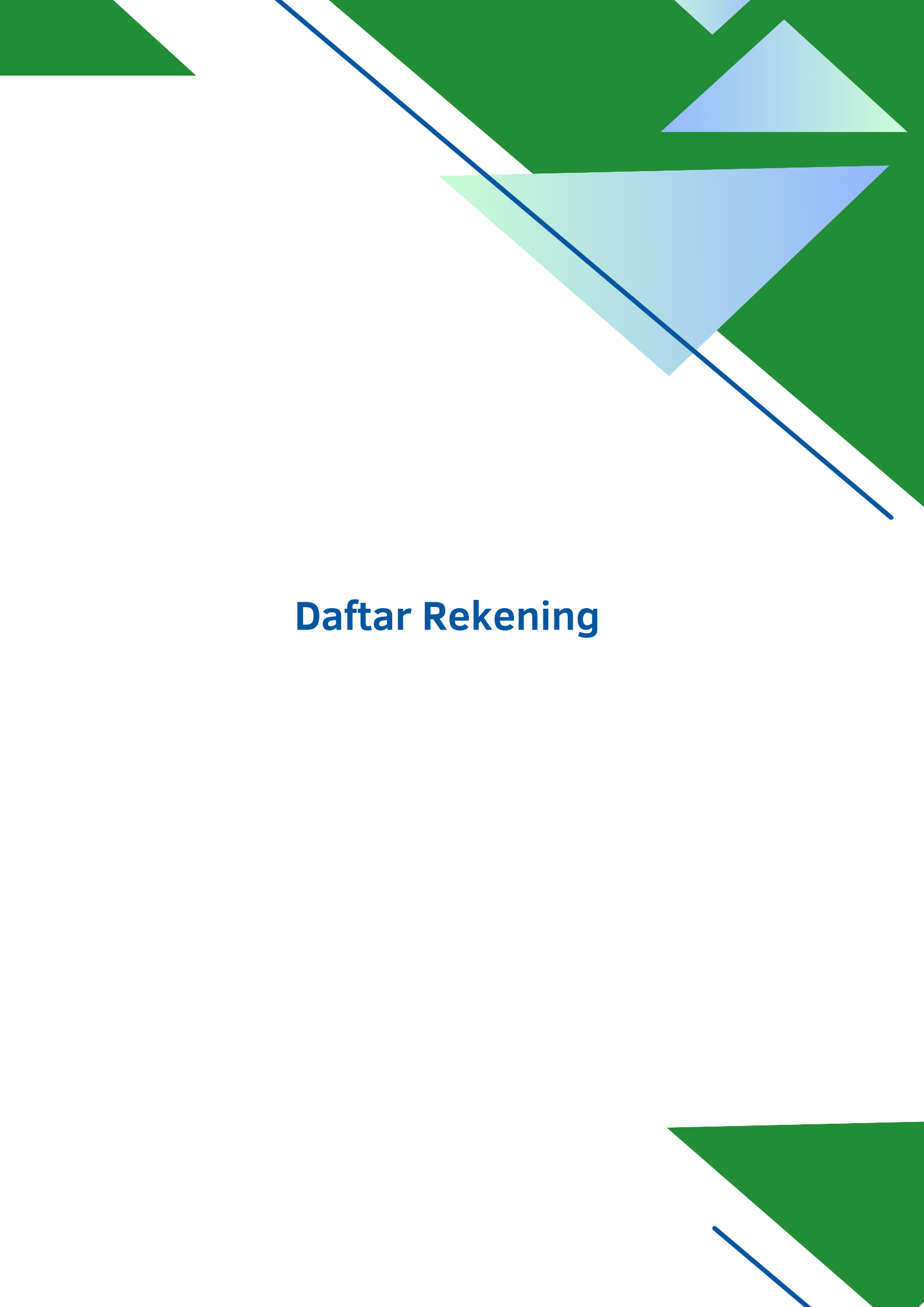
Tabel 34 Monitoring Penutupan Rekening Kementerian / Lembaga untuk Periode yang Berakhir pada 30 Juni 2026

N o	Nama Satker	Kemente rian Negara / Lembaga	BA-EST	Jenis Rekening	Nomor Rekening	Nama Rekening	Bank	Tanggal Penutupan	Alasan Penutupan
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

Pangkalpinang, 30 Juni 2026
Kuasa Pengguna Anggaran



Rosmala Sari



Daftar Rekening

Tabel 35 Rincian Daftar Rekening Periode 30 Juni 2026

No	Nama Satker	Kementerian dan Negara / Lembaga	Jenis Rekening	Nomor Rekening	Nama Rekening	Rekening atas nama	Bank / Kantor Pos	Jumlah Uang
1.	Pengadilan Tinggi Bangka Belitung	Mahkamah Agung	Virtual	654456634041000	BPg 015 Pengadilan Tinggi Babel-03	Pengadilan Tinggi Bangka Belitung	BRI CAB. PANGKALPINANG	Rp.0,-
2.	Pengadilan Tinggi Bangka Belitung	Mahkamah Agung	Giro	0063-01-001681- 30-0	RPL 015 PT Babel Utk Biaya Perkara	Pengadilan Tinggi Bangka Belitung	BRI Cabang Pangkalpinang	Rp.0,-

Pangkalpinang, 30 Juni 2026
Kuasanya Pengguna Anggaran



Rosmala Sari

The image features an abstract geometric design in the top right and bottom right corners. It consists of several overlapping triangles in shades of green and blue, with a prominent blue line running diagonally across the upper half of the page.

Kertas Kerja Telaah

KERTAS KERJA TELAAH LAPORAN KEUANGAN
TINGKAT UNIT AKUNTANSI KUASA PENGGUNA ANGGARAN (UAKPA)
SEMESTER I TA 2026

Kode dan Nama UAPPAW : (005) MAHKAMAH AGUNG RI
 Kode dan Nama Eselon 1 : (03) BADAN PERADILAN UMUM
 Kode dan Nama K/L : (3000) PENGADILAN TINGGI BANGKA BELITUNG
 Kode dan Nama K/L : (663404) PENGADILAN TINGGI BANGKA BELITUNG

Objek Penelaahan		Kondisi LK	Seharusnya
<i>Beri tanda centang (✓) sesuai Laporan Keuangan. Jika tidak ada data, isi dengan N/A</i>			
<i>Bila terisi pada kolom yang tidak seharusnya, agar diuraikan pada lembar lampiran</i>			
KELENGKAPAN LAPORAN KEUANGAN			
Kelengkapan Komponen Laporan Keuangan Pokok		Ada	Tidak
1	Pernyataan Tanggung Jawab	✓	Ada
2	Face LRA, Neraca, LO dan LPE	✓	Ada
3	Catatan atas Laporan Keuangan	✓	Ada
Laporan Keuangan Tambahan		Ada	Tidak
1	Neraca Percobaan Akruai Saldo Awal	✓	Ada
2	Neraca Percobaan Akruai	✓	Ada
3	Neraca Percobaan Kas	✓	Ada
4	Laporan Realisasi Pendapatan dan Belanja per Akun	✓	Ada
KESESUAIAN LAPORAN KEUANGAN DENGAN SAKTI/MYINTRESS			
Kesesuaian Saldo		Sama	Tidak
1.	Semua face laporan (LRA, LO, LPE dan Neraca) sama dengan cetakan laporan pada SAKTI/MONSAKTI	✓	Sama
<i>Laporan Keuangan disusun menggunakan SAKTI/MONSAKTI sehingga harus sama, apabila ada yang tidak sama, uraikan dalam Lampiran Telaah dan penyebabnya.</i>			
KESESUAIAN DENGAN PERSAMAAN DASAR AKUNTANSI			
Persamaan Dasar Akuntansi		Sama	Tidak
1	Nilai "Surplus/(Defisit)-LO" di LO = Nilai "Surplus/ (Defisit) - LO" di LPE	✓	Sama
2	Apakah Saldo "Ekuitas Akhir" di LPE = "Saldo Ekuitas" di Neraca	✓	Sama
3	Neraca : Aset = Kewajiban + Ekuitas	✓	Sama
PENGECHEKAN PADA MYINTRESS			
To Do List		Ya	Tidak
1	Terdapat Pagu Minus per tgl pelaporan	✓	Tidak
2	Satker sudah melakukan Normalisasi dan Tindak Lanjut Normalisasi (dalam hal masih terdapat anomali)	N/A	Ya
3	Terdapat Persediaan Belum Diditilkan per tanggal pelaporan	✓	Tidak
4	Terdapat TK Internal Belum TM Internal Persediaan per tanggal pelaporan	✓	Tidak
5	Terdapat Ketidaksesuaian Akun Vs Kode Barang Persediaan per tanggal pelaporan (Jika ada, sebutkan akun dan alasan ketidaksesuaian di catatan telaah)	✓	Tidak
6	Terdapat Aset Belum Diditilkan per tanggal pelaporan	✓	Tidak
7	Transaksi Reklas Keluar Aset tapi Belum Reklas Masuk per tanggal pelaporan	✓	Tidak
8	Terdapat transaksi Transfer Keluar Internal Belum Transfer Masuk (TM) Internal Aset per tanggal pelaporan	✓	Tidak
9	Ketidaksesuaian Akun Vs Kode Barang Aset Tetap/ATB per tanggal pelaporan (Jika ada, sebutkan akun dan alasan ketidaksesuaian di catatan telaah)	✓	Tidak
10	Terdapat Pendapatan Belum di Settle Piutang per tanggal pelaporan dan Belum dilakukan Penyisihan Piutang	✓	Tidak
11	Terdapat Aset Belum Validasi Approve per tanggal pelaporan	✓	Tidak
12	Terdapat Persediaan Belum Approve per tanggal pelaporan	✓	Tidak
<i>Dalam hal satker telah menindaklanjuti To do List, agar menjelaskan di catatan telaah</i>			
Rekon SAKTI-SPAN (Mengikuti ketentuan kebijakan Rekonsiliasi)		Ada	Tidak
1	Adakah "TDK RUPIAH" yang BEDA?	✓	Tidak
2	Adakah "TDK COA" yang BEDA?	✓	Tidak
3	Adakah "TDK DETAIL" yang BEDA?	✓	Tidak
a.	Pagu/DIPA	✓	Tidak
b.	Estimasi PNB	✓	Tidak

	c. Belanja		√	Tidak
	d. Pengembangan Belanja		√	Tidak
	e. Pendapatan		√	Tidak
	f. Pengembangan Belanja		√	Tidak
	g. Kas BLU		√	Tidak
	h. Kas di Bendahara Pengeluaran		√	Tidak
	i. Kas Hibah		√	Tidak
	j. Pengesahan Hibah Langsung		√	Tidak
	Rekon Internal	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Terdapat Selisih Rekon Internal		√	Tidak
	Daftar MYINTRESS	Ada	Tidak	Seharusnya
1	Adakah "Saldo Tidak Normal"? (Jika ada, sebutkan akun dan alasan penyebab saldo tidak normal di catatan telaah)		√	Ada/Tidak
2	Adakah akun "Belum Diregister"? (Untuk LK Tahunan tidak boleh ada akun 'belum diregister)		√	Ada/Tidak
3	Adakah Neraca Tidak Balance?		√	Tidak
4	Adakah Pagu Minus (Basis SP2D)		√	Tidak
5	Adakah Pengembalian Belanja Melebihi Realisasi?		√	Tidak
6	Adakah Setoran Pajak Non DJP dan DJBC? (selain DJP dan DJBC seharusnya tidak ada)		√	Tidak
PENGECEKAN NERACA PERCOBAAN KAS DAN AKRUAL				
	Pengecekan Saldo Neraca Percobaan	Ada	Tidak	Seharusnya
1.	Terdapat akun dengan uraian "null" pada Neraca Percobaan Akrual		√	Tidak
2	Terdapat akun dengan uraian "uraian tidak ada" pada Neraca Percobaan Kas		√	Tidak
3	Terdapat Saldo bernilai desimal		√	Tidak
	Pengecekan Posisi Saldo (Debet atau Kredit)	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Seluruh Akun 1XXXXX bersaldo (D) (kec. Penyisihan dan Akumulasi)	√		Ya
2	Akun Penyisihan Piutang (116xxx) dan Akumulasi Penyusutan (137xxx dan 169xxx) bersaldo (K)	√		Ya
3	Akun Kewajiban (2xxxxx) bersaldo (K)	√		Ya
4	Akun Pendapatan (4xxxxx) bersaldo (K)	√		Ya
5	Akun Pengembalian Pendapatan (4xxxxx) bersaldo (D)	√		Ya
6	Akun Belanja/Beban (5xxxxx) bersaldo (D) (kecuali Beban Penyisihan Piutang yang bisa bersaldo (K) pada kasus tertentu)	√		Ya
7	Seluruh Akun Pengembalian Belanja (5xxxxx) bersaldo (K)	√		Ya
	Akun-Akun yang tidak boleh ada	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Terdapat Akun "Yang Belum Register" (untuk LK tahunan tidak boleh ada)		√	Ada/Tidak
2	Terdapat Akun 1111xx hingga 1115xx. (Kas Setara Kas yang boleh ada di KL hanya Akun dari		√	Tidak
3	Terdapat Akun 114113/4/6/7 Belanja Pembayaran Bunga/Lain-lain/Hibah/Subsidi dibayar dimuka		√	Tidak
4	Terdapat Akun 114214/5/6/8 Uang Muka Belanja Bunga/Subsidi/ Hibah/Lain-lain		√	Tidak
5	Terdapat Akun "Persediaan untuk Tujuan strategis/berjaga-jaga"		√	Tidak
6	Terdapat Akun 212114/6/9 Belanja Hibah/Utang/Lain-lain Yang Masih Harus Dibayar		√	Tidak
7	Terdapat Akun 391117 (Penyesuaian Nilai Persediaan)		√	Tidak
8	Terdapat akun 41XXXX / 43XXXX (Pendapatan Perpajakan/ Hibah)		√	Tidak
9	Terdapat akun 421xxx/422xxx/423xxx dan 425xxx KHUSUS BUN		√	Tidak
10	Terdapat akun 425xxx Khusus BUN (425143/144/161/162/719/745/772/773/774/815/816/998)		√	Tidak
11	Terdapat akun 425914/5/6/8/9 (Penerimaan kembali belanja Pembayaran Kewajiban		√	Tidak
12	Terdapat akun Belanja 54/55/56/58 (Beban Bunga/Subsidi/Hibah/Lain-Lain)		√	Tidak
13	Terdapat akun-akun yang seharusnya tidak ada pada K/L ybs. (misalnya persediaan Amunisi		√	Tidak
	Jika Bukan Satker BLU	Ada	Tidak	Seharusnya
1	Terdapat akun Neraca (1xxxxx dan 2xxxxx) dengan uraian frasa "BLU"	N/A	N/A	Tidak
2	Terdapat akun 424XXX (Pendapatan BLU)	N/A	N/A	Tidak
3	Terdapat akun 525xxx (Belanja Barang BLU)	N/A	N/A	Tidak
4	Terdapat akun 537xxx (Belanja Modal BLU)	N/A	N/A	Tidak

Terkait Satker BLU		Ya	Tidak	Seharusnya
1	Adakah akun "Kas dan Bank BLU Belum Disahkan" (untuk LK tahunan tidak boleh ada)	N/A	N/A	Ada/Tidak
	Dalam hal masih terdapat akun tersebut, agar menjelaskan di catatan telaah	N/A	N/A	
2	Apakah terdapat selisih transaksi resiprokal pada MONSAKTI? (cek pada MONSAKTI pada menu	N/A	N/A	Tidak
Pengecekan akun yang tidak sesuai karakteristik tupoksi entitas		Ada	Tidak	Seharusnya
1	Adakah terdapat akun yang tidak sesuai Tusi? misalnya ada persediaan/realisasi belanja dalam		√	Tidak
2	Terdapat akun 39112i-Ekuitas Transaksi Lainnya Kecuali Di RRI dan POLRI		√	Tidak
Hibah Langsung		Ada	Tidak	Seharusnya
	Adakah transaksi Penerimaan Hibah Langsung uang/ barang/jasa? Jika ada agar dilanjutkan ke		√	Ada/Tidak
1	Adakah akun 218211 (hibah Langsung Yang Belum Disahkan), akun 218211 hanya boleh muncul di laporan interim (karena masih dalam proses pengesahan). Akun tersebut tidak boleh muncul pada laporan keuangan tahunan.		√	Ada/Tidak
2	Adakah saldo 218211-Hibah langsung yang belum disahkan pada awal tahun? (Cek di Neraca Percobaan saldo awal)		√	Ada/Tidak
3	Apabila terdapat Saldo Awal Akun 218211, Apakah Nilainya sama dengan Akun 391133- Pengesahan Hibah Langsung TAYL pada tahun sebelumnya? (untuk mengecek akun 391133, Cetak di Neraca Percobaan Tahunan TAYL)	N/A	N/A	Ya
4	Jika saldo awal akun 218211 tidak sama saldo akun 391133 di akhir tahun, apakah terdapat Hibah TAYL yang belum disahkan?	N/A	N/A	Ya
5	Jika ada akun 111827 (Kas Lainnya dari Hibah Yang Belum disahkan), apakah nilainya lebih kecil atau maksimal sama dengan akun 218211 (Hibah Langsung Yang Belum Disahkan) ?	N/A	N/A	Ya
	Ada Hibah Langsung pada BLU, jika ada agar dilanjutkan ke pertanyaan berikutnya		√	Ada/Tidak
1	Pengesahan Pendapatan Hibah (424xxx) jika Hibah Uang	N/A	N/A	Ya
Transfer Masuk/Transfer Keluar dan Resiprokal				
1	Nilai absolut selisih Transfer Keluar dan Transfer Masuk pada Monitoring TK/TM pada MONSAKTI		-	
2	Nilai selisih TK/TM (Akun TK dikurang TM di Neraca Percobaan)		-	
3	Apakah terdapat selisih transaksi resiprokal pada MONSAKTI? (cek pada MONSAKTI pada menu		√	Tidak
Akun 425913 (Pengembalian Belanja Modal TAYL)		Ya	Tidak	Seharusnya
1	Apakah terdapat Akun 425913 pada Neraca Percobaan Kas?		√	Ya/Tidak
2	Jika Ada, apakah telah dilakukan Koreksi pencatatan nilai Aset sebesar Pengembalian Belanja Modal TAYL di modul Aset Tetap?	N/A	N/A	Ya/Tidak
3	Jika nilai aset telah dikoreksi pada Modul Aset Tetap periode berjalan, adakah jurnal manual	N/A	N/A	Ya
Akun 491429 (Pendapatan Perolehan Aset Lainnya)		Ya	Tidak	Seharusnya
1	Apakah ada akun 491429 (Pendapatan Perolehan Aset Lainnya)		√	Ya/Tidak
2	Jika ada, apakah benar? (Bukan karena salah pilih menu dalam aplikasi atau salah kode akun saat menjurnal?	N/A	N/A	Ya/Tidak
	Jika ada, konfirmasi kebenarannya, Jelaskan dalam CaLK			
Akun 491511-Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan dan 593311 Beban Penyesuaian		Ya	Tidak	Seharusnya
1	Apakah terdapat saldo akun 491511/593311? Jika ada, maka agar dijelaskan di CaLK terkait koreksi persediaan, serta dicantumkan dalam catatan telaah		√	Ya/Tidak
PENGECEKAN NERACA				
Pengecekan Pos-pos Neraca		Ya	Tidak	Seharusnya
1	Saldo Awal 1 Jan 20XX di MonSAKTI telah sesuai dengan saldo Audited tahun sebelumnya	√		Ya
2	Saldo pada neraca bernilai wajar	√		Ya
3	Kas Di Bendahara Pengeluaran = Uang Muka dari KPPN	√		Ya
4	Kas Di Bendahara Pengeluaran = BAR Rekon = LPJ (Modul Bendahara) *Cek LPJ, Rekening	√		Ya
5	Kas dan Bank BLU = BAR Rekon = LPJ (Modul Bendahara). Apabila berbeda, maka pastikan perbedaannya sebesar saldo kas dan Bank BLU belum disahkan atau Deposito	N/A	N/A	Ya
6	Dari kolom perbandingan, adakah Kenaikan/ Penurunan nilai per pos Neraca yang tidak wajar?		√	Tidak
7	Bandingkan dengan saldo audited tahun sebelumnya, apakah asetnya mengalami peningkatan?	√		Ya
8	Terdapat saldo bernilai desimal		√	Tidak
PENGECEKAN LAPORAN OPERASIONAL				
Pengecekan Pos-pos LO		Ya	Tidak	Seharusnya
1	Terdapat pendapatan perpajakan (kecuali K/L 015)		√	Tidak

2	Terdapat pendapatan hibah (40xxxx), beban pembayaran kewajiban utang (54xxxx), beban subsidi (55xxxx), beban hibah (56xxxx), dan beban transfer ke daerah dan dana desa (6xxxxx).	√	Tidak
3	Terdapat kodifikasi atau uraian akun null	√	Tidak
4	Seluruh akun bernilai positif kecuali beban penyisihan piutang	√	Ya
5	Bandungkan dengan Laporan operasional periode sebelumnya, apakah terdapat peningkatan/penurunan saldo yang signifikan?	√	Ya/Tidak
6	Surplus/defisit LO menampilkan saldo yang wajar	√	Ya/Tidak
7	Apakah terdapat saldo bernilai desimal?	√	Tidak

PENGECEKAN LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Pengecekan Pos-pos LPE		Ya	Tidak	Seharusnya
1	"Ekuitas Awal" + "Kenaikan/Penurunan Ekuitas" = "Ekuitas Akhir"	√		Ya
2	Terdapat kenaikan/penurunan saldo yang signifikan dibandingkan dengan periode sebelumnya		√	Ya/Tidak
3	Terdapat akun "Selisih Revaluasi Aset", Bila ada, cek		√	Tidak
4	Apakah terdapat saldo bernilai desimal?		√	Tidak
Cek seluruh akun koreksi dan Transaksi Antar Entitas		Ya	Tidak	Seharusnya
1	Apakah terdapat pengungkapan yang memadai atas akun koreksi dimaksud?	N/A	N/A	Ya
2	Apakah terdapat pengungkapan yang memadai atas akun-akun pembentuk transaksi antar	N/A	N/A	Ya

PENGECEKAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN/BELANJA dan PENDAPATAN (LRA/B/P)

Pengecekan Pos-pos LRA/B/P		Ya	Tidak	Seharusnya
1	Terdapat saldo negatif di LRA/B		√	Tidak
2	Terdapat pagu minus (Realisasi melebihi pagu)		√	Tidak
3	Terdapat Pengembalian Belanja melebihi Pagu dan Realisasi Belanjanya		√	Tidak
4	Terdapat uraian Jenis Belanja "Tidak Ada"		√	Tidak
5	Apakah terdapat saldo bernilai desimal?		√	Tidak
6	Apakah terdapat pengeluaran belanja untuk Penanganan Pandemi Covid-19? (Mengikuti		√	Ya/Tidak
7	Apabila terdapat pengeluaran belanja dalam rangka Penanganan Pandemi Covid-19, apakah belanja tersebut sudah menggunakan kode akun khusus untuk Penanganan Pandemi Covid-19? (Mengikuti ketentuan mengenai penanganan pandemi)	N/A	N/A	Ya

TELAAH ANTAR LAPORAN KEUANGAN

Jika Jawaban awal "ADA", maka jawaban sub pertanyaan seharusnya "ADA", sebaliknya		Ya	Tidak	Seharusnya
1	Ada Akun Piutang/Piutang TP/Piutang TGR (Neraca) maka akan ada akun :		√	Ya/Tidak
	- Penyisihan Piutang/Pyisihan Bagian Lancar TP/TGR/ Penyisihan TP/TGR (Neraca)		√	Ya/Tidak
	- Beban Penyisihan Piutang (di LO)		√	Ya/Tidak
	- Dokumen Lengkap penetapan dan penatausahaan piutang		√	Ya/Tidak
2	Ada akun Piutang Jangka Panjang (TP/TGR/Lainnya) maka akan ada akun :		√	Ya/Tidak
	- Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang		√	Ya/Tidak
3	Ada persediaan (Neraca) maka akan ada akun :	√		Ya/Tidak
	- Beban Persediaan (di LO)	√		Ya/Tidak
4	Ada Aset Tetap/Aset I lainnya (Neraca) maka akan ada akun :		√	Ya/Tidak
	- Akumulasi AT/AL (Neraca)		√	Ya/Tidak
	- Beban Penyusutan/Amortisasi (di LO)		√	Ya/Tidak
5	Apakah terdapat Akun 42512X pada Neraca Percobaan Kas dan Akual?		√	Ya/Tidak
	Jika Ada, apakah nilai totalnya sama dengan "Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar" di LO?	N/A	N/A	Ya
Pengecekan Beban Diserahkan Ke Masyarakat & Beban Bansos		Ya	Tidak	Seharusnya
1	Apakah ada Beban Barang Diserahkan ke Masyarakat ?		√	Ya/Tidak
	Jika Ya, ada realisasi akun 526XXX pada Neraca Percobaan Kas	N/A	N/A	Ya
2	Apakah ada Beban Bansos ?		√	Ya/Tidak
	Jika Ya, ada realisasi akun 57XXXX pada Neraca Percobaan Kas	N/A	N/A	Ya
Pengecekan Jurnal Manual Akual pada Modul GLP (Jika Ada, Karwas dan/atau Memo Harus Ditatausahakan)		Ya	Tidak	Seharusnya
1	Ada akun Pendapatan Diterima Dimuka (219212) pada Neraca Percobaan Akual		√	Ya/Tidak
2	Ada Realisasi Pendapatan Sewa di Neraca Percobaan Kas (425131/2/3 atau 42492X)		√	Ya/Tidak
	- Maka Ada akun Pendapatan Sewa Diterima Dimuka (219211) pada Neraca Percobaan Akual	N/A	N/A	Ya/Tidak
3	Ada Akun Belanja Dibayar Dimuka (11411X) pada Neraca Percobaan Akual		√	Ya/Tidak
4	Ada realisasi Belanja jasa listrik/air/telepon di Neraca Percobaan Kas (522111/2/3/9)		√	Ya/Tidak
	- Maka Ada akun Belanja Barang Yang Masih Harus Dibayar pada Neraca Percobaan Akual	√		Ya/Tidak
5	Ada akun Belanja Yang Masih Harus Dibayar (2121XX) pada Neraca Percobaan Akual	√		Ya/Tidak

TELAAH LK BLU			
LPSAL BLU			
1	Apakah nilai LPSAL sudah sesuai?	Ya	Tidak
2	Apakah nilai pendapatan alokasi APBN bernilai minus?	N/A	N/A
3	Apakah formula perhitungan SAL pada LPSAL telah sesuai?	N/A	N/A
4	Apakah Saldo Anggaran Lebih (SAL) Awal = Jumlah saldo akun 1119XX selain 111914, 1133XX,	N/A	N/A
5	Apakah Nilai SiLPA/SiKPA pada LPSAL = Nilai Surplus/(defisit) pada LRA	N/A	N/A
6	Apakah Saldo Anggaran Lebih (SAL) Akhir = Jumlah saldo akun 1119XX selain 111914, 1133XX,	N/A	N/A
LAK BLU			
1	Apakah Saldo Awal Kas LAK = Jumlah saldo akun 1119xx, 111826, 1133xx, 165111, dan	Ya	Tidak
2	Apakah Saldo Akhir Kas LAK = Jumlah Rincian Saldo Akhir Kas LAK?	N/A	N/A
3	Apakah Saldo Akhir Kas pada BLU = Kas pada BLU di Neraca	N/A	N/A
4	Saldo Akhir Kas Lainnya dan Setara Kas = Saldo Kas Lainnya di BLU (111826) pada Neraca	N/A	N/A
5	Investasi Jangka Pendek BLU = Investasi Jangka Pendek BLU pada Neraca	N/A	N/A
6	Saldo Akhir Dana Kelolaan BLU = Dana Kelolaan BLU pada Neraca	N/A	N/A
7	Saldo Akhir Kas pada RI II (yang belum disahkan) = Saldo akun 111914 pada Neraca Perencanaan	N/A	N/A
LAMPIRAN KERTAS KERJA TELAAH LAPORAN KEUANGAN			
"Uraikan kode akun dan penyebab terisi pada kolom yang TIDAK SEHARUSNYA, serta hal-hal lainnya yang diperlukan, termasuk			
Mengetahui Pejabat Penyusun LKRL,  (Nurkamala) NIP.198601222006042001 Pangkalpinang, 30 Juni 2026 Pencelaah,  (Rosmala Sari) NIP.198107042006042004			

The background features an abstract geometric design. It includes several large green triangles of varying sizes and orientations. Overlapping these are smaller triangles in shades of light blue and medium blue. A thin, dark blue line runs diagonally from the top left towards the bottom right, intersecting the various colored shapes.

LK Cetakan Monsakti

LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2026
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG 005
ESELON I : Ditjen Badan Peradilan Umum 03
SATUAN KERJA : PENGADILAN TINGGI BANGKA BELITUNG 663404

Tgl Data : 30/07/26 6:50 AM
Tgl Cetak : 30/07/26 9:51 AM
Halaman : 1
lap_lra_face_satker_new_poc

URAIAN	2026				2025			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	4	5	6	7	8	9	10
A. Pendapatan Negara Dan Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Pendapatan Perpajakan	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Pajak Dalam Negeri	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Pajak Perdagangan Internasional	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak	780,000	300,000	(480,000)	38	580,000	160,000	420,000	28
1. Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Pendapatan BLU	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	780,000	300,000	(480,000)	38	580,000	160,000	420,000	28
III. Pendapatan Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah (A.I + A.II + A.III)	780,000	300,000	(480,000)	38	580,000	160,000	420,000	28
B. Belanja Negara	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Belanja Pemerintah Pusat	240,483,000	85,431,200	(155,051,800)	36	199,500,000	70,271,080	129,228,920	35
1. Belanja Pegawai	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Belanja Barang	240,483,000	85,431,200	(155,051,800)	36	199,500,000	70,271,080	129,228,920	35
3. Belanja Modal	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Belanja Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Belanja Subsidi	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Belanja Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Belanja Bantuan Sosial	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Belanja Lain-lain	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Transfer ke Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Dana Bagi Hasil	0	0	0	0	0	0	0	0

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2026
(DALAM RUPIAH)**



KEMENTERIAN/LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG 005
ESELON I : Ditjen Badan Peradilan Umum 03
SATUAN KERJA : PENGADILAN TINGGI BANGKA BELITUNG 663404

Tgl Data : 30/07/26 6:50 AM
Tgl Cetak : 30/07/26 9:51 AM
Halaman : 2
lap_lra_face_satker_new_poc

URAIAN	2026				2025			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	4	5	6	7	8	9	10
2. Dana Alokasi Umum	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Dana Transfer Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Dana Alokasi Khusus Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Dana Alokasi Khusus Non Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
c. Hibah Kepada Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Dana Otonomi Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Dana Desa	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Insentif Fiskal	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Belanja Negara (B.I + B.II)	240,483,000	85,431,200	(155,051,800)	36	199,500,000	70,271,080	129,228,920	35
C. PEMBIAYAAN	0	0	0	0	0	0	0	0

Keterangan :
FINAL

PANGKALPINANG, 30 Juli 2026
Penanggung Jawab UAKPA
KUASA PENGGUNA ANGGARAN

ROSMALA SARI
NIP 198107042006042004

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
MENURUT KELOMPOK PENDAPATAN / AKUN
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2026
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005 MAHKAMAH AGUNG
ESELON I : 03 Ditjen Badan Peradilan Umum
WILAYAH/PROVINSI : 3000 BANGKA BELITUNG
SATUAN KERJA : 663404 PENGADILAN TINGGI BANGKA BELITUNG

Kode Lap : LRA.P.E1.1
Tanggal : 30/07/26 2:29 PM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_pen_akun_satker

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
42	PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK					
4252	Pendapatan Administrasi Dan Penegakan Hukum					
425239	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	780,000	300,000	0	300,000	38.46
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4252	780,000	300,000	0	300,000	38.46
	JUMLAH KELOMPOK PENDAPATAN 42	780,000	300,000	0	300,000	38.46
	JUMLAH PENDAPATAN	780,000	300,000	0	300,000	38.46

LAPORAN PENDAPATAN DARI TRANSAKSI PERTUKARAN DAN NONPERTUKARAN
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2026
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN/LEMBAGA : 005

ESELON I : 03

WILAYAH/PROVINSI : 3000

SATUAN KERJA : 663404

MAHKAMAH AGUNG

Ditjen Badan Peradilan Umum

BANGKA BELITUNG

PENGADILAN TINGGI BANGKA BELITUNG

Kode Lap : LAP.PPP.Satker.1

Tanggal : 30/07/26 2:29 PM

Halaman : 1

Prg ID : lap_pend_pertukaran_satke

AKUN	URAIAN AKUN	PERTUKARAN	NONPERTUKARAN	JUMLAH
1	2	3	4	5=3+4
42	PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	0	300,000	300,000
4252	Pendapatan Administrasi, Penegakan Hukum, dan Hubungan Internasional	0	300,000	300,000
425239	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	0	300,000	300,000
JUMLAH		0	300,000	300,000

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2026



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005 **MAHKAMAH AGUNG**
ESELON I : 03 **Ditjen Badan Peradilan Umum**
WILAYAH/PROVINSI : 3000 **BANGKA BELITUNG**
SATUAN KERJA : 663404 **PENGADILAN TINGGI BANGKA BELITUNG**
JENIS SATUAN KERJA : KD

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 30/07/26 2:27 PM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_bel_akun_satker_poc
Tgl Data : 30/7/26 12:59 PM

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
52	BELANJA BARANG							
5211	Belanja Barang Operasional							
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	35,725,000	35,725,000	17,316,500	0	17,316,500	48.47	18,408,500
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5211	35,725,000	35,725,000	17,316,500	0	17,316,500	48.47	18,408,500
5212	Belanja Barang Non Operasional							
521211	Belanja Bahan	21,300,000	19,280,000	11,630,000	0	11,630,000	60.32	7,650,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212	21,300,000	19,280,000	11,630,000	0	11,630,000	60.32	7,650,000
5218	Belanja Barang Persediaan							
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	13,925,000	11,140,000	7,017,000	0	7,017,000	62.99	4,123,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5218	13,925,000	11,140,000	7,017,000	0	7,017,000	62.99	4,123,000
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri							
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	127,700,000	61,420,000	46,267,700	0	46,267,700	75.33	15,152,300
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	7,200,000	5,600,000	3,200,000	0	3,200,000	57.14	2,400,000
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	38,880,000	38,880,000	0	0	0	0	38,880,000
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	68,438,000	68,438,000	0	0	0	0	68,438,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241	242,218,000	174,338,000	49,467,700	0	49,467,700	28.37	124,870,300
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	313,168,000	240,483,000	85,431,200	0	85,431,200	35.52	155,051,800
	JUMLAH BELANJA	313,168,000	240,483,000	85,431,200	0	85,431,200	35.52	155,051,800

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
MENURUT SUMBER DANA/PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2026**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005 MAHKAMAH AGUNG
ESELON I : 03 Ditjen Badan Peradilan Umum
WILAYAH/PROVINSI : 005033000KD BANGKA BELITUNG
SATUAN KERJA : 663404 PENGADILAN TINGGI BANGKA BELITUNG
JENIS SATUAN KERJA : KD

Kode Lap : LRA.B.S.1
Tanggal : 30/07/26 2:29 PM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_bel_sgo_poc

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
01 1049 AEA 52 5212 521211	RUPIAH MURNI Peningkatan Manajemen Peradilan Umum Koordinasi BELANJA BARANG Belanja Barang Non Operasional Belanja Bahan	10,100,000	8,080,000	7,480,000	0	7,480,000	92.57	600,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212	10,100,000	8,080,000	7,480,000	0	7,480,000	92.57	600,000
5241 524111 524113	Belanja Perjalanan Dalam Negeri Belanja Perjalanan Dinas Biasa Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	127,700,000 7,200,000	61,420,000 5,600,000	46,267,700 3,200,000	0 0	46,267,700 3,200,000	75.33 57.14	15,152,300 2,400,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241	134,900,000	67,020,000	49,467,700	0	49,467,700	73.81	17,552,300
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	145,000,000	75,100,000	56,947,700	0	56,947,700	75.83	18,152,300
	JUMLAH BELANJA OUTPUT 1049.AEA	145,000,000	75,100,000	56,947,700	0	56,947,700	75.829	18,152,300
BCA 52 5211 521114	Perkara Hukum Perseorangan BELANJA BARANG Belanja Barang Operasional Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	35,725,000	35,725,000	17,316,500	0	17,316,500	48.47	18,408,500
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5211	35,725,000	35,725,000	17,316,500	0	17,316,500	48.47	18,408,500
5212 521211	Belanja Barang Non Operasional Belanja Bahan	7,200,000	7,200,000	4,150,000	0	4,150,000	57.64	3,050,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212	7,200,000	7,200,000	4,150,000	0	4,150,000	57.64	3,050,000
5218 521811	Belanja Barang Persediaan Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	13,925,000	11,140,000	7,017,000	0	7,017,000	62.99	4,123,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5218	13,925,000	11,140,000	7,017,000	0	7,017,000	62.99	4,123,000
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	56,850,000	54,065,000	28,483,500	0	28,483,500	52.68	25,581,500
	JUMLAH BELANJA OUTPUT 1049.BCA	56,850,000	54,065,000	28,483,500	0	28,483,500	52.684	25,581,500
	JUMLAH BELANJA KEGIATAN1049	201,850,000	129,165,000	85,431,200	0	85,431,200	66.14	43,733,800
	JUMLAH BELANJA SUMBER DANA 01	201,850,000	129,165,000	85,431,200	0	85,431,200	66.14	43,733,800
04 1049 AEA 52	PNBP Peningkatan Manajemen Peradilan Umum Koordinasi BELANJA BARANG							

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
MENURUT SUMBER DANA/PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2026**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005 MAHKAMAH AGUNG
ESELON I : 03 Ditjen Badan Peradilan Umum
WILAYAH/PROVINSI : 005033000KD BANGKA BELITUNG
SATUAN KERJA : 663404 PENGADILAN TINGGI BANGKA BELITUNG
JENIS SATUAN KERJA : KD

Kode Lap : LRA.B.S.1
Tanggal : 30/07/26 2:29 PM
Halaman : 2
Prg ID : lap_lra_bel_sgo_poc

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
5212	Belanja Barang Non Operasional							
521211	Belanja Bahan	4,000,000	4,000,000	0	0	0	0	4,000,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212	4,000,000	4,000,000	0	0	0	0	4,000,000
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri							
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	38,880,000	38,880,000	0	0	0	0	38,880,000
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	68,438,000	68,438,000	0	0	0	0	68,438,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241	107,318,000	107,318,000	0	0	0	0	107,318,000
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	111,318,000	111,318,000	0	0	0	0	111,318,000
	JUMLAH BELANJA OUTPUT 1049.AEA	111,318,000	111,318,000	0	0	0	0	111,318,000
	JUMLAH BELANJA KEGIATAN1049	111,318,000	111,318,000	0	0	0	0	111,318,000
	JUMLAH BELANJA SUMBER DANA 04	111,318,000	111,318,000	0	0	0	0	111,318,000
	JUMLAH BELANJA	313,168,000	240,483,000	85,431,200	0	85,431,200	35.52	155,051,800

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
MENURUT SUMBER DANA / PROGRAM / KEGIATAN
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2026

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005
SATUAN KERJA : 663404

MAHKAMAH AGUNG
PENGADILAN TINGGI BANGKA BELITUNG

Kode Lap : LRA.B.E1.2
Tanggal : 30/07/26 2:28 PM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_bel_prog_giat_satker_poc

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=5/4	9=4-7
01	RUPIAH MURNI							
BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum							
1049	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	201,850,000	129,165,000	85,431,200	0	85,431,200	66.14	43,733,800
	JUMLAH BELANJA PROGRAM BF	201,850,000	129,165,000	85,431,200	0	85,431,200	66.14	43,733,800
	JUMLAH BELANJA RUPIAH MURNI	201,850,000	129,165,000	85,431,200	0	85,431,200	66.14	43,733,800
04	PNBP							
BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum							
1049	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	111,318,000	111,318,000	0	0	0	0	111,318,000
	JUMLAH BELANJA PROGRAM BF	111,318,000	111,318,000	0	0	0	0	111,318,000
	JUMLAH BELANJA PNBP	111,318,000	111,318,000	0	0	0	0	111,318,000
	JUMLAH	313,168,000	240,483,000	85,431,200	0	85,431,200	35.52	155,051,800

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT SATUAN KERJA
MENURUT SUMBER DANA / JENIS BELANJA / AKUN
S.D BULAN JUNI 2026

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005
SATUAN KERJA : 663404

MAHKAMAH AGUNG
PENGADILAN TINGGI BANGKA BELITUNG

Kode Lap : LRA.B.S.1
Tanggal : 30/07/26 2:28 PM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_sd_jb_akun_satker_poc

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
01	RUPIAH MURNI							
52	BELANJA BARANG							
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	35,725,000	35,725,000	17,316,500	0	17,316,500	48.47	18,408,500
521211	Belanja Bahan	17,300,000	15,280,000	11,630,000	0	11,630,000	76.11	3,650,000
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	13,925,000	11,140,000	7,017,000	0	7,017,000	62.99	4,123,000
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	127,700,000	61,420,000	46,267,700	0	46,267,700	75.33	15,152,300
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	7,200,000	5,600,000	3,200,000	0	3,200,000	57.14	2,400,000
	JUMLAH BELANJA BARANG	201,850,000	129,165,000	85,431,200	0	85,431,200	66.14	43,733,800
	JUMLAH RUPIAH MURNI	201,850,000	129,165,000	85,431,200	0	85,431,200	66.14	43,733,800
04	PNBP							
52	BELANJA BARANG							
521211	Belanja Bahan	4,000,000	4,000,000	0	0	0	0	4,000,000
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	38,880,000	38,880,000	0	0	0	0	38,880,000
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	68,438,000	68,438,000	0	0	0	0	68,438,000
	JUMLAH BELANJA BARANG	111,318,000	111,318,000	0	0	0	0	111,318,000
	JUMLAH PNBP	111,318,000	111,318,000	0	0	0	0	111,318,000
	TOTAL	313,168,000	240,483,000	85,431,200	0	85,431,200	35.52	155,051,800

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT SATUAN KERJA
MENURUT FUNGSI / SUB FUNGSI / PROGRAM / KEGIATAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2026

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005 **MAHKAMAH AGUNG**
SATUAN KERJA : 663404 **PENGADILAN TINGGI BANGKA BELITUNG**

Tanggal : 30/07/26 2:27 PM
 Halaman : 1
 Prg ID : lap_lra_fsfp_g_satker_poc

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=5/4	9=4-7
03	KETERTIBAN DAN KEAMANAN							
04	PERADILAN							
BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum							
1049	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	313,168,000	240,483,000	85,431,200	0	85,431,200	35.52	155,051,800
	JUMLAH PROGRAM Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	313,168,000	240,483,000	85,431,200	0	85,431,200	35.52	155,051,800
	JUMLAH SUBFUNGSI PERADILAN	313,168,000	240,483,000	85,431,200	0	85,431,200	35.52	155,051,800
	JUMLAH FUNGSI KETERTIBAN DAN KEAMANAN	313,168,000	240,483,000	85,431,200	0	85,431,200	35.52	155,051,800

NERACA
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 30 JUNI 2026
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG
UNIT ORGANISASI : (03) Ditjen Badan Peradilan Umum
WILAYAH/PROVINSI : (3000) BANGKA BELITUNG
SATUAN KERJA : (663404) PENGADILAN TINGGI BANGKA BELITUNG

Tgl Data : 30/07/26 6:50 AM

Tgl Cetak : 30/07/26 9:51 AM

Halaman : 1

lap_neraca_satker_komparatif_poc

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2026	2025	Jumlah	%
1	2	3	4	5
ASET				
ASET LANCAR				
Kas di Bendahara Pengeluaran	5,000,000	0	5,000,000	0.00
Persediaan	16,714,148	30,918,728	(14,204,580)	(45.94)
JUMLAH ASET LANCAR	21,714,148	30,918,728	(9,204,580)	(29.77)
JUMLAH ASET	21,714,148	30,918,728	(9,204,580)	(29.77)
KEWAJIBAN				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
Utang kepada Pihak Ketiga	0	3,999,500	(3,999,500)	(100.00)
Utang Yang Belum Ditagihkan	2,655,000	0	2,655,000	0.00
Uang Muka dari KPPN	5,000,000	0	5,000,000	0.00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	7,655,000	3,999,500	3,655,500	91.40
JUMLAH KEWAJIBAN	7,655,000	3,999,500	3,655,500	91.40
EKUITAS				
EKUITAS				
Ekuitas	14,059,148	26,919,228	(12,860,080)	(47.77)
JUMLAH EKUITAS	14,059,148	26,919,228	(12,860,080)	(47.77)
JUMLAH EKUITAS	14,059,148	26,919,228	(12,860,080)	(47.77)
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	21,714,148	30,918,728	(9,204,580)	(29.77)

Keterangan :

FINAL

PANGKALPINANG, 30 Juli 2026

Penanggung Jawab UAKPA

KUASA PEGGUNA ANGGARAN



ROSMALA SARI

NIP 198107042006042004

NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 30 JUNI 2026

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG

UNIT ORGANISASI : (03) Ditjen Badan Peradilan Umum

WILAYAH/PROVINSI : (3000) BANGKA BELITUNG

SATUAN KERJA : (663404) PENGADILAN TINGGI BANGKA BELITUNG

Tgl Data : 30/07/26 6:40 AM

Tgl Cetak : 30/07/26 9:52 AM

Halaman : 1

lap_neraca_percobaan_kas_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBIT	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	313111	DITAGIHKAN KE ENTITAS LAIN	0	85,431,200
0.0	313121	DITERIMA DARI ENTITAS LAIN	300,000	0
3.0	425239	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	0	300,000
3.0	521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	17,316,500	0
3.0	521211	Belanja Bahan	11,630,000	0
3.0	521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	7,017,000	0
3.0	524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	46,267,700	0
3.0	524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	3,200,000	0
JUMLAH			85,731,200	85,731,200

Keterangan :

FINAL

PANGKALPINANG, 30 Juli 2026

Penanggung Jawab UAKPA

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

ROSMALA SARI

198107042006042004

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 30 JUNI 2026

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG

UNIT ORGANISASI : (03) Ditjen Badan Peradilan Umum

WILAYAH/PROVINSI : (3000) BANGKA BELITUNG

SATUAN KERJA : (663404) PENGADILAN TINGGI BANGKA BELITUNG

Tgl Data : 30/07/26 6:50 AM

Tgl Cetak : 30/07/26 9:52 AM

Halaman : 1

lap_neraca_percobaan_akrual_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	111611	Kas di Bendahara Pengeluaran	5,000,000	0
0.0	117111	Barang Konsumsi	16,714,148	0
0.0	218111	Utang Yang Belum Diterima Tagihannya	0	2,655,000
0.0	219511	Uang Muka dari KPPN	0	5,000,000
0.0	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	0	85,431,200
0.0	313121	Diterima dari Entitas Lain	300,000	0
0.0	313211	Transfer Keluar	12,316,580	0
0.0	391111	Ekuitas	0	26,919,228
3.0	425239	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	0	300,000
3.0	521114	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	15,022,000	0
3.0	521211	Beban Bahan	12,580,000	0
3.0	524111	Beban Perjalanan Dinas Biasa	46,267,700	0
3.0	524113	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	3,200,000	0
3.0	593111	Beban Persediaan konsumsi	8,905,000	0
JUMLAH			120,305,428	120,305,428

Keterangan :

FINAL

PANGKALPINANG, 30 Juli 2026

Penanggung Jawab UAKPA

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

ROSMALA SARI

NIP 198107042006042004

NERACA PERCOBAAN
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 1 JANUARI 2026 (SALDO AWAL)
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005
UNIT ORGANISASI : 03
WILAYAH/PROVINSI : 3000
SATUAN KERJA : 663404

MAHKAMAH AGUNG
Ditjen Badan Peradilan Umum
BANGKA BELITUNG
PENGADILAN TINGGI BANGKA BELITUNG

Tgl. Cetak 30/07/2026 9:54 AM
lap_neraca_percobaan_sawal_akrual_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	117111	Barang Konsumsi	30,918,728	0
0.0	212112	Belanja barang yang masih harus dibayar	0	3,999,500
0.0	391111	Ekuitas	0	26,919,228
JUMLAH			30,918,728	30,918,728

LAPORAN OPERASIONAL

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 30 JUNI 2026

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG
 ESELON I : (03) Ditjen Badan Peradilan Umum
 WILAYAH/PROVINSI : (3000) BANGKA BELITUNG
 SATUAN KERJA : (663404) PENGADILAN TINGGI BANGKA BELITUNG

Tgl Data : 30/07/26 12:46 PM

Tgl Cetak : 30/07/26 2:11 PM

Halaman : 1

lap_lo_satker_poc

URAIAN	2026	2025	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN PERPAJAKAN	0	0	0	
Pendapatan Pajak Penghasilan	0	0	0	
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	0	0	0	
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Cukai	0	0	0	
Pendapatan Pajak Lainnya	0	0	0	
Pendapatan Bea Masuk	0	0	0	
Pendapatan Bea Keluar	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Perpajakan	0	0	0	
PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	0	0	0	
Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	
Pendapatan dari Kekayaan Negara dipisahkan (KND)	0	0	0	
Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	300,000	160,000	140,000	87.5
Pendapatan Badan Layanan Umum	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	300,000	160,000	140,000	87.5
PENDAPATAN HIBAH	0	0	0	
Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan	300,000	160,000	140,000	87.5
BEBAN OPERASIONAL	0	0	0	
Beban Pegawai	0	0	0	
Beban Persediaan	8,905,000	8,891,156	13,844	0.156
Beban Barang dan Jasa	27,602,000	16,280,000	11,322,000	69.545
Beban Pemeliharaan	0	0	0	
Beban Perjalanan Dinas	49,467,700	47,249,080	2,218,620	4.696
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	0	0	0	

LAPORAN OPERASIONAL

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 30 JUNI 2026

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG
 ESELON I : (03) Ditjen Badan Peradilan Umum
 WILAYAH/PROVINSI : (3000) BANGKA BELITUNG
 SATUAN KERJA : (663404) PENGADILAN TINGGI BANGKA BELITUNG

Tgl Data : 30/07/26 12:46 PM

Tgl Cetak : 30/07/26 2:11 PM

Halaman : 2

lap_lo_satker_poc

URAIAN	2026	2025	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
Beban Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	
Beban Subsidi	0	0	0	
Beban Hibah	0	0	0	
Beban Bantuan Sosial	0	0	0	
Beban Penyusutan dan Amortisasi	0	0	0	
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	0	0	0	
Beban Transfer ke Daerah	0	0	0	
Beban Lain-Lain	0	0	0	
JUMLAH BEBAN	85,974,700	72,420,236	13,554,464	18.716
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL	(85,674,700)	(72,260,236)	(13,414,464)	18.564
KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	
Surplus/Defisit Pelepasan Aset	0	0	0	
Pendapatan Pelepasan Aset	0	0	0	
Beban Pelepasan Aset	0	0	0	
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(85,674,700)	(72,260,236)	(13,414,464)	18.564
POS LUAR BIASA	0	0	0	
Beban Luar Biasa	0	0	0	
POS LUAR BIASA	0	0	0	
SURPLUS/DEFISIT - LO	(85,674,700)	(72,260,236)	(13,414,464)	18.564

Keterangan :
FINAL

PANGKALPINANG, 30 Juli 2026
Penanggung Jawab UAKPA
KUASA PENGGUNA ANGGARAN



ROSMALA SARI
NIP 198107042006042004

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 30 JUNI 2026

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG

UNIT ORGANISASI : (03) Ditjen Badan Peradilan Umum

WILAYAH/PROVINSI : (3000) BANGKA BELITUNG

SATUAN KERJA : (663404) PENGADILAN TINGGI BANGKA BELITUNG

Tgl Data : 30/07/26 6:40 AM

Tgl Cetak : 30/07/26 9:51 AM

Halaman : 1

lap_lpe_satker_poc

URAIAN	2026	2025	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
EKUITAS AWAL	26,919,228	31,809,910	(4,890,682)	(15.37)
SURPLUS/DEFISIT-LO	(85,674,700)	(72,260,236)	(13,414,464)	18.56
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	0	0	0	0
PENYESUAIAN NILAI ASET	0	0	0	0
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	72,814,620	45,647,942	27,166,678	59.51
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	(12,860,080)	(26,612,294)	13,752,214	(51.68)
EKUITAS AKHIR	14,059,148	5,197,616	8,861,532	170.49

Keterangan :

FINAL

PANGKALPINANG, 30 Juli 2026

Penanggung Jawab UAKPA

KUASA PEGGUNA ANGGARAN

ROSMALA SARI

NIP 198107042006042004

**LAPORAN BARANG PERSEDIAAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2026**

Tgl Data : 30/07/26 6:40 AM

Tanggal : 30/07/26 9:56 AM

Halaman : 1

Kode Lap : lap_bmn_sedia_satker_poc

UAPB : 005 MAHKAMAH AGUNG
UAKPB : 663404 PENGADILAN TINGGI BANGKA BELITUNG

Kode	Uraian	Jumlah
117111	Barang Konsumsi	
1010301001	Alat Tulis	2,260,000
1010301003	Penjepit Kertas	483,000
1010301004	Penghapus/Korektor	318,000
1010301005	Buku Tulis	236,000
1010301006	Ordner Dan Map	1,295,000
1010301007	Penggaris	85,000
1010301008	Cutter (Alat Tulis Kantor)	98,000
1010301010	Alat Perekat	285,000
1010301012	Staples	75,000
1010301013	Isi Staples	8,000
1010301014	Barang Cetak	3,217,324
1010301999	Alat Tulis Kantor Lainnya	602,000
1010302001	Kertas HVS	965,000
1010302002	Berbagai Kertas	135,000
1010302004	Amplop	24,000
1010302999	Kertas Dan Cover Lainnya	92,000
1010304004	Tinta/Toner Printer	1,270,000
1010304006	USB/Flash Disk	400,000
1010304011	CD/DVD	250,000
1010307006	Atribut	4,615,824
Jumlah Barang Konsumsi		16,714,148
TOTAL		16,714,148

Keterangan :

- Persediaan senilai Rp. 0 dalam kondisi rusak.
- Persediaan senilai Rp. 0 dalam kondisi usang.

LAPORAN CRBMN KUASA PENGGUNA
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2026

NAMA UAKPB : 663404 PENGADILAN TINGGI BANGKA BELITUNG

Tanggal : 30/07/2026 09.56.32
Halaman : 1 dari 1
Kode Lap : lap_crbrmn_satker_po

JENIS TRANSAKSI		SAT	GABUNGAN INTRA & EKSTRAKOMPTABEL		INTRAKOMPTABEL		EKSTRAKOMPTABEL	
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9
TOTAL								

Pangkalpinang, 30 July 2026
Penanggung Jawab UAKPB
SEKRETARIS

ROSMALA SARI
198107042006042004

**LAPORAN PENYUSUTAN BARANG KUASA PENGGUNA
INTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2026**

UAPB : 005 MAHKAMAH AGUNG
UAKPB : 663404 PENGADILAN TINGGI BANGKA BELITUNG

Tgl Data : 30/07/26 6:40 AM
Tgl Cetak : 30/07/26 9:55 AM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_bmn_susut_intra_kel_satker_poc

AKUN NERACA/KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO 30 JUNI 2026					
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	AKUMULASI PENYUSUTAN			NILAI BUKU
					SALDO AWAL	MUTASI PENYUSUTAN	TOTAL	
1	2	3	4	5	6	7	8=6+7	9=5-8

Pangkalpinang, 30 Juli 2026
Penanggung Jawab UAKPB
SEKRETARIS

ROSMALA SARI
198107042006042004

**LAPORAN PENYUSUTAN BARANG KUASA PENGGUNA
EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2026**

UAPB : 005 MAHKAMAH AGUNG
UAKPB : 663404 PENGADILAN TINGGI BANGKA BELITUNG

Tgl Data : 30/07/26 6:40 AM
Tgl Cetak : 30/07/26 9:55 AM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_bmn_susut_ekstra_kel_satker_poc

AKUN NERACA/KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO 30 JUNI 2026					
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	AKUMULASI PENYUSUTAN			NILAI BUKU
					SALDO AWAL	MUTASI PENYUSUTAN	TOTAL	
1	2	3	4	5	6	7	8=6+7	9=5-8

Pangkalpinang, 30 Juli 2026
Penanggung Jawab UAKPB
SEKRETARIS

ROSMALA SARI
198107042006042004

**LAPORAN BARANG KUASA PENGGUNA
ASET TAK BERWUJUD
RINCIAN PER KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2026**

UAPB : 005
UAKPB : 663404

MAHKAMAH AGUNG
PENGADILAN TINGGI BANGKA BELITUNG

Tgl Data : 30/07/26 6:40 AM
Tanggal : 30/07/26 9:54 AM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_atb_kel_satker_poc

AKUN NERACA/KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO PER 1 JANUARI 2026		MUTASI				SALDO PER 30 JUNI 2026	
					BERTAMBAH		BERKURANG			
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Pangkalpinang, 30 Juli 2026
Penanggung Jawab UAKPB

SEKRETARIS



ROSMALA SARI
198107042006042004

**LAPORAN BARANG PENGGUNA
INTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2026**

UAPB : 005
UAKPB : 663404

**MAHKAMAH AGUNG
PENGADILAN TINGGI BANGKA BELITUNG**

Tgl Data : 30/07/26 6:40 AM
Tgl Cetak : 30/07/26 9:54 AM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_bmn_intra_kel_satker_poc

AKUN NERACA/KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO PER 1 JANUARI 2026		MUTASI				SALDO PER 30 JUNI 2026	
					BERTAMBAH		BERKURANG			
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Pangkalpinang, 30 Juli 2026
Penanggung Jawab UAKPB
SEKRETARIS

ROSMALA SARI
198107042006042004

**LAPORAN BARANG KUASA PENGGUNA
EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2026**

UAPB : 005 MAHKAMAH AGUNG
UAKPB : 663404 PENGADILAN TINGGI BANGKA BELITUNG

Tgl Data : 30/07/26 6:40 AM
Tgl Cetak : 30/07/26 9:54 AM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_bmn_ekstra_kel_satker_poc

AKUN NERACA/KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO 30 JUNI 2026					
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	AKUMULASI PENYUSUTAN			NILAI BUKU
					SALDO AWAL	MUTASI PENYUSUTAN	TOTAL	
1	2	3	4	5	6	7	8=6+7	9=5-8

Pangkalpinang, 30 Juli 2026
Penanggung Jawab UAKPB
SEKRETARIS

ROSMALA SARI
198107042006042004

**LAPORAN BARANG PENGGUNA
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2026**

UAPB : 005 MAHKAMAH AGUNG
UAKPB : 663404 PENGADILAN TINGGI BANGKA BELITUNG

Tgl Data : 30/07/26 6:40 AM

Tgl Cetak : 30/07/26 9:54 AM

Halaman : 1

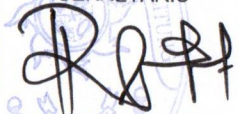
Kode Lap : lap_bmn_gab_kel_satker_poc

AKUN NERACA/KELOMPOK BARANG		SATUAN	SALDO PER 1 JANUARI 2026		MUTASI				SALDO PER 30 JUNI 2026	
					BERTAMBAH		BERKURANG			
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Pangkalpinang, 30 Juli 2026

Penanggung Jawab UAKPB

SEKRETARIS



ROSMALA SARI

198107042006042004

LAPORAN POSISI BARANG MILIK NEGARA DI NERACA
POSISI PER TANGGAL 30 JUNI 2026
TAHUN ANGGARAN 2026

JAPB : 005 MAHKAMAH AGUNG
JAKPB : 663404 PENGADILAN TINGGI BANGKA BELITUNG

Tgl.Data : 30/07/26 6:40 AM

Tgl.Cetak : 30/07/26 9:56 AM

Halaman : 1

Kode Lap : lap_bmn_neraca_face_satker_pc

AKUN NERACA		JUMLAH
KODE	URAIAN	
1	2	3
117111	Barang Konsumsi	16,714,148
J U M L A H		16,714,148

Pangkalpinang, 30 Juli 2026

Penanggung Jawab UAKPB

SEKRETARIS



ROSMALA SARI

198107042006042004

LAPORAN POSISI BARANG MILIK NEGARA DI NERACA
POSISI PER TANGGAL 01 JANUARI 2026(SALDO AWAL)
TAHUN ANGGARAN 2026

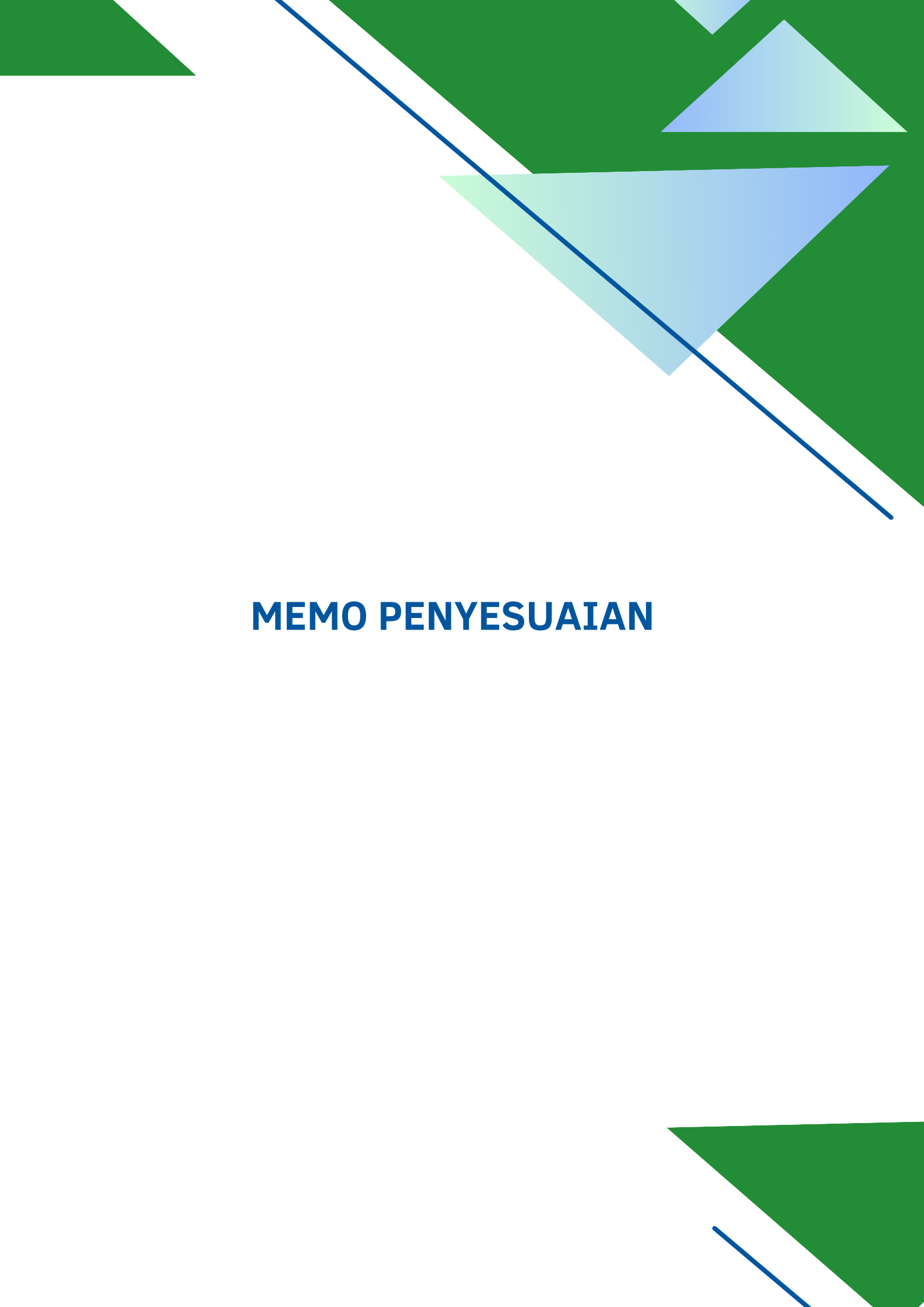
UAPB : 005 MAHKAMAH AGUNG
UAKPB : 663404 PENGADILAN TINGGI BANGKA BELITUNG

Tanggal : 30/07/26 9:56 AM

Halaman : 1

Kode Lap : lap_bmn_neraca_sawal_satker_poc

AKUN NERACA		JUMLAH
KODE	URAIAN	
1	2	3
117111	Barang Konsumsi	30,918,728
JUMLAH		30,918,728



MEMO PENYESUAIAN

FORMULIR MEMO PENYESUAIAN

Kementerian Negara/Lembaga : 005 Mahkamah Agung RI
 Eselon I : 03 Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum
 Wilayah : 3000 Bangka Belitung
 Satuan Kerja : 663404 Pengadilan Tinggi Bangka Belitung
 No. Dokumen : 010
 Tanggal : 30 Juni 2026
 Tahun Anggaran : 2026
 Keterangan : Jurnal balik awal Tagihan Pos Surat bulan Desember 2025
 dibayarkan bulan Januari 2026

Kategori Jurnal Penyesuaian

☐ Pendapatan Diterima Dimuka	☐ Kas di Bendahara Penerimaan
☐ Pendapatan yang Masih Harus Dibayar	☐ Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran
☐ ... Belanja Dibayar Dimuka	☐ Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan
☒ Belanja yang Masih Harus Dibayar	☐ Persekot Gaji
☐ Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	☐ Selisih Kurs
☐ Penyusutan dan Amortisasi	☐ Transfer
☐ Persediaan	☐ Reklasifikasi
☐ Uang Muka Belanja	☐ Koreksi Antar Beban
☐ Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan	☐ Koreksi Lainnya
☐ Pembentukan/Koreksi/Reklasifikasi Piutang	☐ RPATA

No	Kode Akun	Uraian Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
1	212112	Belanja barang yang masih harus dibayar	3.999.500	
	522114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat		3.999.500

Direkam Tanggal : 30 Juni 2026

Operator SAKTI



Dewi Wulandari

Disetujui

Kuasa Pengguna Anggaran



Rosmala Sari



LAMPIRAN TAMBAHAN



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI BANGKA BELITUNG

Jalan Pulau Bangka, Kelurahan Air Itam, Kecamatan Bukit Intan
Kota Pangkalpinang, Kepulauan Bangka Belitung 33684, www.pt-babel.go.id, pt_babel@yahoo.co.id

BERITA ACARA

PEMERIKSAAN OPNAME FISIK PERSEDIAAN
Nomor : 1918/SEK/PT/W7-U/PL-1-2/VI/2026

Nama Satker : PENGADILAN TINGGI BANGKA BELITUNG.
Kode Satker : 005.03.3000.663404.
UAPPB-W : PENGADILAN TINGGI BANGKA BELITUNG.
UAPPB-E1 : BADAN PERADILAN UMUM.
UAPB : MAHKAMAH AGUNG RI.

Pada hari ini Selasa tanggal tiga puluh bulan Juni tahun dua ribu dua puluh enam bertempat di Pengadilan Tinggi Bangka Belitung, Kami yang bertanda tangan di bawah ini, Tim Opname Fisik Barang Persediaan:

1. Nama : Siti Komari, S.E., M.M.
NIP : 198401142009042004
Jabatan : Ketua
2. Nama : Irvafianty, S.Kom.
NIP : 198209242011012014
Jabatan : Sekretaris
3. Nama : Arga Jeremia Sinaga, S.T.
NIP : 199712172025061007
Jabatan : Anggota
4. Nama : Febryan Nanda Poetra
Nip : 199302022025211046
Jabatan : Anggota
5. Nama : Firmansyah
Nip : 198704202025211042
Jabatan : Anggota

Menyatakan bahwa telah melakukan opname fisik barang persediaan Semester I Tahun 2026 dengan hasil sebagaimana terlampir dalam hasil opname fisik.

Demikian Berita Acara Opname Fisik Barang Persediaan ini dibuat untuk bahan penyusunan Laporan Keuangan Semester I Tahun 2026, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,
Kuasa Pengguna Barang
Pengadilan Tinggi Bangka Belitung


PROSMALASARI



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI BANGKA BELITUNG

Jalan Pulau Bangka, Kelurahan Air Itam, Kecamatan Bukit Intan
Kota Pangkalpinang, Kepulauan Bangka Belitung 33684, www.pt-babel.go.id, pt_babel@yahoo.co.id

HASIL OPNAME FISIK

Nama Satker : PENGADILAN TINGGI BANGKA BELITUNG.
Kode Satker : 005.03.3000.663404.
UAPPB-W : PENGADILAN TINGGI BANGKA BELITUNG.
UAPPB-EI : BADAN PERADILAN UMUM.
UAPB : MAHKAMAH AGUNG RI.

No.	Nama Barang	Kode Barang	Satuan	Kuantitas Barang			Selisih	Kondisi		
				Saldo Sakti	Hasil Fisik	Cek		Baik	Usang	Rusak
1	Spidol boardmarker	1010301001000002	buah	7	7		0	√	0	-
2	Spidol permanen	1010301001000004	buah	13	13		0	√	0	-
3	Spidol kecil Hitam	1010301001000005	buah	14	14		0	√	0	-
4	Pensil 2B	1010301001000006	buah	12	12		0	√	0	-
5	Pena Bold Liner Hitam	1010301001000010	Buah	34	34		0	√	0	-
6	Pena Ball Liner Hitam	1010301001000017	pcs	9	9		0	√	0	-
7	Pena Bold Liner Biru	1010301001000020	pcs	55	55		0	√	0	-
8	Pena joyko JK 100	1010301001000021	pcs	87	87		0	√	0	-
9	Stabilo	1010301001000023	pcs	18	18		0	√	0	-
10	pena greebel	1010301001000024	pcs	10	10		0	√	0	-
11	Paper clips	1010301003000001	kotak	36	36		0	√	0	-
12	Binder clips no.111	1010301003000002	kotak	12	12		0	√	0	-
13	Binder clips no.260	1010301003000004	kotak	5	5		0	√	0	-
14	Binder clips no. 155	1010301003000007	box	12	12		0	√	0	-
15	Binder clips no. 107	1010301003000008	box	17	17		0	√	0	-
16	Binder Clips No. 105	1010301003000009	box	11	11		0	√	0	-
17	Tipe ex	1010301004000002	buah	1	1		0	√	0	-
18	Correction tape	1010301004000004	pcs	1	1		0	√	0	-
19	Tip E-X Pontel	1010301004000005	Pcs	10	10		0	√	0	-
20	Buku folio	1010301005000001	buah	1	1		0	√	0	-
21	Buku ekspedisi	1010301005000002	buah	3	3		0	√	0	-
22	Buku kuarto	1010301005000003	buah	3	3		0	√	0	-
23	Buku Folio 200 L	1010301005000007	Pcs	4	4		0	√	0	-

24	Box File	1010301006000001	buah	10	10	0	√	0	-
25	Map biola biasa	1010301006000003	kotak	7	7	0	√	0	-
26	Bussiness file	1010301006000005	pak	5	5	0	√	0	-
27	PP Plastik Pocket	1010301006000014	pack	5	5	0	√	0	-
28	plastik pp pocket f4	1010301006000015	pack	1	1	0	√	0	-
29	Penggaris besi.	1010301007000001	buah	17	17	0	√	0	-
30	Cutter	1010301008000001	buah	1	1	0	√	0	-
31	Gunting besar	1010301008000003	buah	7	7	0	√	0	-
32	Lakban coklat 2	1010301010000002	buah	7	7	0	√	0	-
33	Lakban hitam 1,5	1010301010000011	buah	4	4	0	√	0	-
34	Lakban bening 2	1010301010000012	buah	1	1	0	√	0	-
35	Lem Stick 40 gr	1010301010000017	buah	10	10	0	√	0	-
36	Stapler kecil	1010301012000001	buah	5	5	0	√	0	-
37	Isi staples 23 10	1010301013000003	kotak	4	4	0	√	0	-
38	Register Induk Permohonan Banding Perkara Pidana Anak PT	1010301014000001	Buah	2	2	0	√	0	-
39	Register Penahanan Anak	1010301014000005	buah	2	2	0	√	0	-
40	Register permohonan Grasi perkara pidana Anak	1010301014000011	Buah	2	2	0	√	0	-
41	Register Induk Tipikor Pengadilan Tinggi	1010301014000021	Buah	1	1	0	√	0	-
42	Register Induk Perkara Pidana Banding PN	1010301014000027	Buah	4	4	0	√	0	-
43	Register Induk Perkara Pidana Kasasi PN	1010301014000028	Buah	2	2	0	√	0	-
44	Register pendaftaran perjanjian Bersama Bipartit	1010301014000064	Buah	2	2	0	√	0	-
45	Buku kas Bantu PT	1010301014000070	Buah	2	2	0	√	0	-
46	Buku kas Bantu PN	1010301014000071	Buah	8	8	0	√	0	-
47	Buku Jurnal keuangan Perkara PT KII-A2	1010301014000072	Buah	3	3	0	√	0	-
48	Buku Jurnal keuangan perkara PT KII-A1	1010301014000073	Buah	3	3	0	√	0	-
49	Buku Jurnal keuangan Perkara PT KII-A3	1010301014000074	Buah	3	3	0	√	0	-
50	BUKU JURNAL KEUAGAN PERKARA PN KI-A2	1010301014000125	BUAH	1	1	0	√	0	-
51	Buku Jurnal Keuangan PHI	1010301014000163	pcs	2	2	0	√	0	-

52	sign here	1010301999000023	pcs	17	17	0	√	0	-
53	sticky note	1010301999000024	pcs	9	9	0	√	0	-
54	transparent flag	1010301999000025	pcs	10	10	0	√	0	-
55	Kertas f4 70 gram	1010302001000001	rim	12	12	0	√	0	-
56	Kertas A4	1010302001000002	rim	10	10	0	√	0	-
57	Kertas samson	1010302002000001	lembar	5	5	0	√	0	-
58	Kertas stiker glossy	1010302002000004	pak	4	4	0	√	0	-
59	Amplop coklat kabinet	1010302004000003	pak	1	1	0	√	0	-
60	Post It B Sticky Notes TJ 654	1010302999000002	pcs	8	8	0	√	0	-
61	Post It TJ 44-P Transparent flag	1010302999000003	pcs	1	1	0	√	0	-
62	Tinta printer Ox Ink Canon Cyan	1010304004000010	botol	1	1	0	√	0	-
63	Tinta printer Ox Ink Canon Magenta	1010304004000011	botol	1	1	0	√	0	-
64	Tinta printer Ox Ink Canon Yellow	1010304004000012	botol	1	1	0	√	0	-
65	Tinta printer Ox Ink Canon Black	1010304004000013	botol	1	1	0	√	0	-
66	Tinta printer Ox Ink Epson Black	1010304004000014	botol	2	2	0	√	0	-
67	Tinta printer Ox Ink Epson Cyan	1010304004000015	botol	1	1	0	√	0	-
68	Tinta printer Ox Ink Epson Magenta	1010304004000016	botol	1	1	0	√	0	-
69	Tinta printer Ox Ink Epson Yellow	1010304004000017	botol	1	1	0	√	0	-
70	Tinta Epson 664 Magenta	1010304004000018	botol	1	1	0	√	0	-
71	Tinta Epson 664 Cyan	1010304004000019	botol	1	1	0	√	0	-
72	Tinta Epson 664 Yellow	1010304004000020	botol	1	1	0	√	0	-
73	Flash Disk 8 GB	1010304006000002	buah	4	4	0	√	0	-
74	CD R.	1010304011000003	pcs	85	85	0	√	0	-
75	BENDERA MAHKAMAH AGUNG	1010307006000001	BUAH	8	8	0	√	0	-

Tim Pelaksana Opname Fisik:

1. Siti Komari, S.E, M.M.

.....
2. Irva Nofianti, S.Kom.

.....
3. Arga Jeremia Sinaga, S.T.

.....
4. Febryan Nanda Poetra

.....
5. Firmansyah

.....

Mengetahui,

Kuasa Pengguna Barang

Pengadilan Tinggi Bangka Belitung





ROSMA SARI

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN

Bulan: Juni 2026

Kementerian/Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG Tgl, No. SP : 01 Desember 2025 , DIPA-005.03.2.663404/2026

Unit Organisasi : (03) Ditjen Badan Peradilan Umum Tahun : 2026

Provinsi/Kabupaten/Kota : (30.51) KEPULAUAN BANGKA BELITUNG / KOTA PANGKALPINANG KPPN : (015) Pangkal Pinang

Satuan Kerja : (663404) PENGADILAN TINGGI BANGKA BELITUNG

Alamat dan No Telp :

I. Keadaan Pembukuan bulan pelaporan dengan saldo pada BKU sebesar Rp. 2.345.000,00 Dan Nomor Bukti terakhir Nomor. 00060/KW/663404/2026

	Jenis Buku Pembantu	Saldo Awal (Rp.)	Penambahan (Rp.)	Pengurangan (Rp.)	Saldo Akhir (Rp.)
1	2	3	4	5	6
A	BP Kas, BPP dan UM	2.107.500,00	33.190.130,00	32.952.630,00	2.345.000,00
	1. BP Kas (Tunai & Bank)	2.107.500,00	33.190.130,00	32.952.630,00	2.345.000,00
	2. BP UM (Voucher)	0,00	0,00	0,00	0,00
	3. BP BPP	0,00	0,00	0,00	0,00
B	BP Selain Kas	2.107.500,00	16.819.930,00	16.582.430,00	2.345.000,00
	1. BP UP*)	2.107.500,00	8.840.000,00	8.602.500,00	2.345.000,00
	2. BP TUP*)	0,00	0,00	0,00	0,00
	3. BP LS-Bendahara	0,00	7.530.200,00	7.530.200,00	0,00
	4. BP Pajak	0,00	449.730,00	449.730,00	0,00
	5. BP Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00
	6. BP Lain-lain	0,00	0,00	0,00	0,00

*) jumlah pengurangan sudah termasuk kuitansi UP yang belum di-SPM-kan sebesar Rp. 2.655.000,00

*) jumlah pengurangan sudah termasuk kuitansi TUP yang belum di-SPM-kan sebesar Rp. 0,00

II. Keadaan kas pada akhir Bulan Pelaporan

1. Uang Tunai di Brankas	Rp.	2.345.000,00	
2. Uang di Rekening Bank	Rp.	0,00	(terlampir salinan rekening koran)
3. Jumlah Kas	Rp.	2.345.000,00	

III. Selisih Kas

1. Saldo Akhir BP Kas (I.A 1 kolom (6))	Rp.	2.345.000,00
2. Jumlah Kas (II.3)	Rp.	2.345.000,00
3. Selisih Kas	Rp.	0,00

IV. Hasil Rekonsiliasi Internal dengan UAKPA

A. UP		
1. Saldo UP	Rp.	2.345.000,00
2. Kwitansi UP belum di SPJ-kan	Rp.	2.655.000,00
3. Jumlah Saldo dan Kwitansi UP	Rp.	5.000.000,00
4. Saldo UP menurut UAKPA	Rp.	5.000.000,00
5. Selisih Pembukuan UP	Rp.	0,00
B. TUP		
1. Saldo TUP	Rp.	0,00
2. Kwitansi TUP belum di SPJ-kan	Rp.	0,00
3. Jumlah Saldo dan Kwitansi TUP	Rp.	0,00
4. Saldo TUP menurut UAKPA	Rp.	0,00
5. Selisih Pembukuan TUP	Rp.	0,00
C. Lainnya		
1. Saldo Lainnya	Rp.	0,00
2. Saldo Lainnya Menurut UAKPA	Rp.	0,00
3. Selisih Pembukuan Lainnya	Rp.	0,00

V. Penjelasan Selisih Kas dan / atau selisih pembukuan (apabila ada)

- 1. Selisih Kas (III.3) : 0,00-
- 2. Selisih Pembukuan UP (IV.A.5) : 0,00-
- 3. Selisih Pembukuan TUP (IV.B.5) : 0,00-
- 4. Selisih Pembukuan Lainnya (IV.C.3) : 0,00-

Mengetahui
Kuasa Pengguna Anggaran



ROSMALA SARI
NIP 198107042006042004

KOTA PANGKALPINANG, Juni 2026

Bendahara Pengeluaran



DESSY TRIASTUTI
NIP 198312212009042004



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
PROVINSI BANGKA BELITUNG
KPPN PANGKAL PINANG

HASIL REKONSILIASI SAKTI - SPAN
PADA SATKER 663404 - PENGADILAN TINGGI BANGKA BELITUNG
SAMPAI DENGAN PERIODE 2026-06

Tgl Cetak : 30/07/26 2:44

Kode Lap : shr_kppn_poc

No	Jenis Rekon	Nilai SPAN	Nilai SAKTI	Selisih
1	Pagu Belanja	240,483,000	240,483,000	0
2	Belanja	85,431,200	85,431,200	0
3	Pengembalian Belanja	0	0	0
4	Estimasi Pendapatan	780,000	780,000	0
5	Pendapatan Bukan Pajak	300,000	300,000	0
6	Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
7	Pengembalian Pajak	0	0	0
8	Mutasi Uang Persediaan	5,000,000	5,000,000	0
9	Kas di Bendahara Pengeluaran	5,000,000	5,000,000	0
10	Kas pada Badan Layanan Umum	0	0	0
11	Kas Lainnya di K/L dari Hibah	0	0	0
12	Pengesahan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga	0	0	0

Catatan Satker:

Catatan KPPN:

Diterbitkan secara otomatis pada tanggal 20 Juli 2026





MONITORING CAPAIAN KINERJA

NO	TAHUN ANGGARAN 12	KODE BA	NAMA KEMENTERIAN	KODE ES1	NAMA ES1	KODE SATKER	NAMA SATKER	NOMOR DIPA	KODE PERIODE	NOMOR REVISI	KODE FUNGSI	KODE PROGRAM	KODE KEGIATAN	KODE KRO	KODE RO	URAIAN RO	SATUAN	TARGET VOLUME	REALISASI VOLUME	PROGRES CAPAIAN	KETERANGAN	PAGU BELANJA	REALISASI BELANJA	NILAI BELANJA	NILAI BELANJA SP2B	NILAI BELANJA KOREKSI	NILAI BELANJA KOREKSI SP2B	NILAI PEMULIHAN PAGU	NILAI BELANJA SP3	PERSEN REALISASI	TGL KIRIM DATA	TGL FLAG OMSPAN	KODE TEMATIK	KODE PRIORITAS NASIONAL	DESKRIPSI KODE PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	DESKRIPSI PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	DESKRIPSI KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	MAJOR PROJECT	PAGU TERAKHIR KHUSUS PERIODE 12	REVISI TERAKHIR KHUSUS PERIODE 12
1	2026	005	MAHKAMAH AGUNG	03	Dijlen Badan Peradilan Umum	663404	PENGADILAN TINGGI BANGKA BELITUNG	DIPA-005.03.2.663404/2026	2026-01	1	03.04	BF	1049	BCA	U02	Perkara Pidana Korupsi yang Diselesaikan Ditingkat Banding di wilayah Barat	Perkara	15	0	0	Belum ada perkara putus	10.650.000	0	0	0	0	0	0	0	2026-04-17	2026-04-17	000-2026	00-2026	Bukan Prioritas Nasional	00.00-2026	Bukan Program Prioritas	00.00-2026	Tidak Ada Informasi	Tidak Ada Informasi	Bukan Major Project	0	0	
2	2026	005	MAHKAMAH AGUNG	03	Dijlen Badan Peradilan Umum	663404	PENGADILAN TINGGI BANGKA BELITUNG	DIPA-005.03.2.663404/2026	2026-01	1	03.04	BF	1049	AEA	004	Koordinasi Pembinaan Teknis Percepatan Penyelesaian Perkara	kegiatan	1	0	0.05	Dikarenakan masih ada anggaran yang diblokir, kegiatan direncanakan diadakan di triwulan 3 setelah buka blokir	111.318.000	0	0	0	0	0	0	2026-04-17	2026-04-17	000-2026	00-2026	Bukan Prioritas Nasional	00.00-2026	Bukan Program Prioritas	00.00-2026	Tidak Ada Informasi	Tidak Ada Informasi	Bukan Major Project	0	0		
3	2026	005	MAHKAMAH AGUNG	03	Dijlen Badan Peradilan Umum	663404	PENGADILAN TINGGI BANGKA BELITUNG	DIPA-005.03.2.663404/2026	2026-01	1	03.04	BF	1049	AEA	003	Koordinasi Percepatan Penyelesaian Perkara di Lingkungan Peradilan Umum	kegiatan	1	0	0.05	Belum ada Realisasi. Kegiatan direncanakan diadakan di bulan Juni 2026, hal ini sudah dirapatkan dengan bagian kepaniteraan	14.650.000	0	0	0	0	0	0	2026-04-17	2026-04-17	000-2026	00-2026	Bukan Prioritas Nasional	00.00-2026	Bukan Program Prioritas	00.00-2026	Tidak Ada Informasi	Tidak Ada Informasi	Bukan Major Project	0	0		
4	2026	005	MAHKAMAH AGUNG	03	Dijlen Badan Peradilan Umum	663404	PENGADILAN TINGGI BANGKA BELITUNG	DIPA-005.03.2.663404/2026	2026-01	1	03.04	BF	1049	AEA	001	Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Aparatur Tenaga Teknis di Lingkungan Peradilan Umum	kegiatan	6	0	0.05	Belum ada Realisasi Kegiatan, namun sudah diadakan Pembuatan Program Perjalanan Dinas untuk Binwas	60.450.000	0	0	0	0	0	0	2026-04-17	2026-04-17	000-2026	00-2026	Bukan Prioritas Nasional	00.00-2026	Bukan Program Prioritas	00.00-2026	Tidak Ada Informasi	Tidak Ada Informasi	Bukan Major Project	0	0		
5	2026	005	MAHKAMAH AGUNG	03	Dijlen Badan Peradilan Umum	663404	PENGADILAN TINGGI BANGKA BELITUNG	DIPA-005.03.2.663404/2026	2026-02	2	03.04	BF	1049	BCA	U02	Perkara Pidana Korupsi yang Diselesaikan Ditingkat Banding di wilayah Barat	Perkara	15	1	6.67	Realisasi berupa pengiriman surat penahanan dan ATK Tipkor	10.650.000	710.000	710.000	0	0	0	6.67	2026-04-17	2026-04-17	000-2026	00-2026	Bukan Prioritas Nasional	00.00-2026	Bukan Program Prioritas	00.00-2026	Tidak Ada Informasi	Tidak Ada Informasi	Bukan Major Project	0	0		
6	2026	005	MAHKAMAH AGUNG	03	Dijlen Badan Peradilan Umum	663404	PENGADILAN TINGGI BANGKA BELITUNG	DIPA-005.03.2.663404/2026	2026-02	2	03.04	BF	1049	AEA	001	Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Aparatur Tenaga Teknis di Lingkungan Peradilan Umum	kegiatan	6	0	0.1	Belum ada Realisasi Kegiatan, namun sudah diadakan Pembuatan Program Perjalanan Dinas untuk Binwas	60.450.000	0	0	0	0	0	0	2026-04-17	2026-04-17	000-2026	00-2026	Bukan Prioritas Nasional	00.00-2026	Bukan Program Prioritas	00.00-2026	Tidak Ada Informasi	Tidak Ada Informasi	Bukan Major Project	0	0		
7	2026	005	MAHKAMAH AGUNG	03	Dijlen Badan Peradilan Umum	663404	PENGADILAN TINGGI BANGKA BELITUNG	DIPA-005.03.2.663404/2026	2026-02	2	03.04	BF	1049	AEA	003	Koordinasi Percepatan Penyelesaian Perkara di Lingkungan Peradilan Umum	kegiatan	1	0	0.1	Belum ada Realisasi, Kegiatan direncanakan diadakan di bulan Juni 2026, hal ini sudah dirapatkan dengan bagian kepaniteraan	14.650.000	0	0	0	0	0	0	2026-04-17	2026-04-17	000-2026	00-2026	Bukan Prioritas Nasional	00.00-2026	Bukan Program Prioritas	00.00-2026	Tidak Ada Informasi	Tidak Ada Informasi	Bukan Major Project	0	0		
8	2026	005	MAHKAMAH AGUNG	03	Dijlen Badan Peradilan Umum	663404	PENGADILAN TINGGI BANGKA BELITUNG	DIPA-005.03.2.663404/2026	2026-02	2	03.04	BF	1049	AEA	004	Koordinasi Pembinaan Teknis Percepatan Penyelesaian Perkara	kegiatan	1	0	0.1	Dikarenakan masih ada anggaran yang diblokir, kegiatan direncanakan diadakan di triwulan 3 setelah buka blokir, kegiatan yang sudah diadakan mencari hotel untuk kegiatan tersebut	111.318.000	0	0	0	0	0	0	2026-04-17	2026-04-17	000-2026	00-2026	Bukan Prioritas Nasional	00.00-2026	Bukan Program Prioritas	00.00-2026	Tidak Ada Informasi	Tidak Ada Informasi	Bukan Major Project	0	0		
9	2026	005	MAHKAMAH AGUNG	03	Dijlen Badan Peradilan Umum	663404	PENGADILAN TINGGI BANGKA BELITUNG	DIPA-005.03.2.663404/2026	2026-02	2	03.04	BF	1049	BCA	U01	Perkara Pidana Yang Diselesaikan di Tingkat Banding di wilayah Barat	Perkara	95	30	21.4	Jumlah Perkara putus pidana bulan februari 2026 sebanyak 10 perkara	43.415.000	9.289.500	9.289.500	0	0	0	21.4	2026-04-17	2026-04-17	000-2026	00-2026	Bukan Prioritas Nasional	00.00-2026	Bukan Program Prioritas	00.00-2026	Tidak Ada Informasi	Tidak Ada Informasi	Bukan Major Project	0	0		



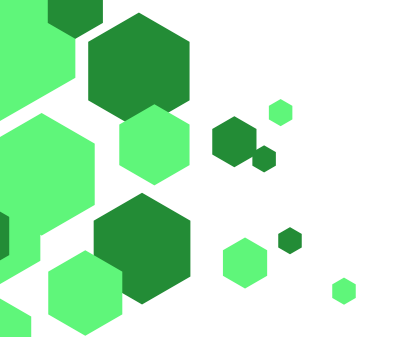
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
DJPh

NO	TAHUN ANGGARAN	KODE BA	NAMA KEMENTERIAN	KODE ES1	NAMA ES1	KODE SATKER	NAMA SATKER	NOMOR DIPA	KODE PERIODE	NOMOR REVISI	KODE FUNGSI	KODE PROGRAM	KODE KEGIATAN	KODE KRO	KODE RO	URAIAN RO	SATUAN	TARGET VOLUME	REALISASI VOLUME	PROGRES CAPAIAN	KETERANGAN	PAGU BELANJA	REALISASI BELANJA	NILAI BELANJA	NILAI BELANJA SP2B	NILAI BELANJA KOREKSI	NILAI BELANJA KOREKSI SP2B	NILAI PEMULIHAN PAGU	NILAI BELANJA SP3	PERSEN REALISASI	TGL KIRIM DATA	TGL FLAG OMSPAN	KODE TEMATIK	KODE PRIORITAS NASIONAL	DESKRIPSI KODE PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	DESKRIPSI PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	DESKRIPSI KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	MAJOR PROJECT	PAGU TERAKHIR KHUSUS PERIODE 12	REVISI TERAKHIR KHUSUS PERIODE 12
10	2026	005	MAHKAMAH AGUNG	03	Dijlen Badan Peradilan Umum	663404	PENGADILAN TINGGI BANGKA BELITUNG	DIPA-005.03.2.663404/2026	2026-03	2	03.04	BF	1049	AEA	001	Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Aparatur Tenaga Teknis di Lingkungan Peradilan Umum	kegiatan	6	1	4.07	Kegiatan Binwas ke PN Pangkalpinang	60.450.000	2.400.000	2.400.000	0	0	0	0	3.97	2026-04-17	2026-04-17	000-2026	00-2026	Bukan Prioritas Nasional	00.00-2026	Bukan Program Prioritas	00.00-2026	Tidak Ada Informasi	Tidak Ada Informasi	Bukan Major Project	0	0	
11	2026	005	MAHKAMAH AGUNG	03	Dijlen Badan Peradilan Umum	663404	PENGADILAN TINGGI BANGKA BELITUNG	DIPA-005.03.2.663404/2026	2026-03	2	03.04	BF	1049	BCA	U02	Perkara Pidana Korupsi yang Diselesaikan di Tingkat Banding di wilayah Barat	Perkara	15	2	11.42	Realisasi Berupa Pembayaran Pos untuk pengiriman surat penahanan dan ATK Tipikor	10.650.000	1.210.000	1.210.000	0	0	0	0	11.36	2026-04-17	2026-04-17	000-2026	00-2026	Bukan Prioritas Nasional	00.00-2026	Bukan Program Prioritas	00.00-2026	Tidak Ada Informasi	Tidak Ada Informasi	Bukan Major Project	0	0	
12	2026	005	MAHKAMAH AGUNG	03	Dijlen Badan Peradilan Umum	663404	PENGADILAN TINGGI BANGKA BELITUNG	DIPA-005.03.2.663404/2026	2026-03	2	03.04	BF	1049	BCA	U01	Perkara Pidana Yang Diselesaikan di Tingkat Banding di wilayah Barat	Perkara	95	50	26.23	Realisasi Perkara pidana putus sebanyak 30 Perkara	43.415.000	11.389.500	11.389.500	0	0	0	0	26.23	2026-04-17	2026-04-17	000-2026	00-2026	Bukan Prioritas Nasional	00.00-2026	Bukan Program Prioritas	00.00-2026	Tidak Ada Informasi	Tidak Ada Informasi	Bukan Major Project	0	0	
13	2026	005	MAHKAMAH AGUNG	03	Dijlen Badan Peradilan Umum	663404	PENGADILAN TINGGI BANGKA BELITUNG	DIPA-005.03.2.663404/2026	2026-03	2	03.04	BF	1049	AEA	004	Koordinasi Pembinaan Teknis Pencapaian Penyelesaian Perkara	kegiatan	1	0	0.15	Dikarenakan masih ada anggaran yang diblokir, kegiatan direncanakan diadakan di triwulan 3 setelah buka blokir	111.318.000	0	0	0	0	0	0	0	2026-04-17	2026-04-17	000-2026	00-2026	Bukan Prioritas Nasional	00.00-2026	Bukan Program Prioritas	00.00-2026	Tidak Ada Informasi	Tidak Ada Informasi	Bukan Major Project	0	0	
14	2026	005	MAHKAMAH AGUNG	03	Dijlen Badan Peradilan Umum	663404	PENGADILAN TINGGI BANGKA BELITUNG	DIPA-005.03.2.663404/2026	2026-03	2	03.04	BF	1049	AEA	003	Koordinasi Pencapaian Penyelesaian Perkara di Lingkungan Peradilan Umum	kegiatan	1	0	0.15	Belum ada Realisasi, Kegiatan direncanakan diadakan di bulan Juni 2026, hal ini sudah dirapatkan dengan bagian kepaniteraan	14.650.000	0	0	0	0	0	0	0	2026-04-17	2026-04-17	000-2026	00-2026	Bukan Prioritas Nasional	00.00-2026	Bukan Program Prioritas	00.00-2026	Tidak Ada Informasi	Tidak Ada Informasi	Bukan Major Project	0	0	
15	2026	005	MAHKAMAH AGUNG	03	Dijlen Badan Peradilan Umum	663404	PENGADILAN TINGGI BANGKA BELITUNG	DIPA-005.03.2.663404/2026	2026-04	3	03.04	BF	1049	BCA	U01	Perkara Pidana Yang Diselesaikan di Tingkat Banding di wilayah Barat	Perkara	95	60	40.01	Jumlah Perkara putus pidana sebanyak 17 Perkara	43.415.000	17.372.000	17.372.000	0	0	0	0	40.01	2026-05-02	2026-05-02	000-2026	00-2026	Bukan Prioritas Nasional	00.00-2026	Bukan Program Prioritas	00.00-2026	Tidak Ada Informasi	Tidak Ada Informasi	Bukan Major Project	0	0	
16	2026	005	MAHKAMAH AGUNG	03	Dijlen Badan Peradilan Umum	663404	PENGADILAN TINGGI BANGKA BELITUNG	DIPA-005.03.2.663404/2026	2026-04	3	03.04	BF	1049	AEA	004	Koordinasi Pembinaan Teknis Pencapaian Penyelesaian Perkara	kegiatan	1	0	0.2	Dikarenakan masih ada anggaran yang diblokir, kegiatan direncanakan diadakan di triwulan 3 setelah buka blokir	111.318.000	0	0	0	0	0	0	0	2026-05-02	2026-05-02	000-2026	00-2026	Bukan Prioritas Nasional	00.00-2026	Bukan Program Prioritas	00.00-2026	Tidak Ada Informasi	Tidak Ada Informasi	Bukan Major Project	0	0	
17	2026	005	MAHKAMAH AGUNG	03	Dijlen Badan Peradilan Umum	663404	PENGADILAN TINGGI BANGKA BELITUNG	DIPA-005.03.2.663404/2026	2026-04	3	03.04	BF	1049	AEA	003	Koordinasi Pencapaian Penyelesaian Perkara di Lingkungan Peradilan Umum	kegiatan	1	0	0.2	Belum ada Realisasi, Kegiatan direncanakan diadakan di bulan Juni 2026, hal ini sudah dirapatkan dengan bagian kepaniteraan	14.650.000	0	0	0	0	0	0	0	2026-05-02	2026-05-02	000-2026	00-2026	Bukan Prioritas Nasional	00.00-2026	Bukan Program Prioritas	00.00-2026	Tidak Ada Informasi	Tidak Ada Informasi	Bukan Major Project	0	0	
18	2026	005	MAHKAMAH AGUNG	03	Dijlen Badan Peradilan Umum	663404	PENGADILAN TINGGI BANGKA BELITUNG	DIPA-005.03.2.663404/2026	2026-05	3	03.04	BF	1049	BCA	U02	Perkara Pidana Korupsi yang Diselesaikan di Tingkat Banding di wilayah Barat	Perkara	15	2	24.66	Belum ada perkara putus untuk pidana tipikor, realisasi berupa perpanjangan penahanan dan ATK	10.650.000	2.491.500	2.491.500	0	0	0	0	23.39	2026-06-03	2026-06-03	000-2026	00-2026	Bukan Prioritas Nasional	00.00-2026	Bukan Program Prioritas	00.00-2026	Tidak Ada Informasi	Tidak Ada Informasi	Bukan Major Project	0	0	
19	2026	005	MAHKAMAH AGUNG	03	Dijlen Badan Peradilan Umum	663404	PENGADILAN TINGGI BANGKA BELITUNG	DIPA-005.03.2.663404/2026	2026-05	3	03.04	BF	1049	BCA	U01	Perkara Pidana Yang Diselesaikan di Tingkat Banding di wilayah Barat	Perkara	95	65	49.2	Realisasi sudah sesuai	43.415.000	21.112.000	21.112.000	0	0	0	0	48.63	2026-06-03	2026-06-03	000-2026	00-2026	Bukan Prioritas Nasional	00.00-2026	Bukan Program Prioritas	00.00-2026	Tidak Ada Informasi	Tidak Ada Informasi	Bukan Major Project	0	0	
20	2026	005	MAHKAMAH AGUNG	03	Dijlen Badan Peradilan Umum	663404	PENGADILAN TINGGI BANGKA BELITUNG	DIPA-005.03.2.663404/2026	2026-05	3	03.04	BF	1049	AEA	001	Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Aparatur Tenaga Teknis di Lingkungan Peradilan Umum	kegiatan	6	4	72.83	Kegiatan Binwas untuk Semester I sudah selesai dilaksanakan	60.450.000	42.417.500	42.417.500	0	0	0	0	70.17	2026-06-03	2026-06-03	000-2026	00-2026	Bukan Prioritas Nasional	00.00-2026	Bukan Program Prioritas	00.00-2026	Tidak Ada Informasi	Tidak Ada Informasi	Bukan Major Project	0	0	



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
DJPh

NO	TAHUN ANGGARAN	KODE BA	NAMA KEMENTERIAN	KODE ES1	NAMA ES1	KODE SATKER	NAMA SATKER	NOMOR DIPA	KODE PERIODE	NOMOR REVISI	KODE FUNGSI	KODE PROGRAM	KODE KEGIATAN	KODE KRO	KODE RO	URAIAN RO	SATUAN	TARGET VOLUME	REALISASI VOLUME	PROGRES CAPAIAN	KETERANGAN	PAGU BELANJA	REALISASI BELANJA	NILAI BELANJA	NILAI BELANJA SP2B	NILAI BELANJA KOREKSI SP2B	NILAI PEMULIHAN PAGU	NILAI BELANJA SP3	Persen Realisasi	TGL KIRIM DATA	TGL FLAG OMSPAN	KODE TEMATIK	KODE PRIORITAS NASIONAL	DESKRIPSI KODE PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	DESKRIPSI PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	DESKRIPSI KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	MAJOR PROJECT	PAGU TERAKHIR KHUSUS PERIODE 12	REVISI TERAKHIR KHUSUS PERIODE 12
21	2026	005	MAHKAMAH AGUNG	03	Dijlen Badan Peradilan Umum	663404	PENGADILAN TINGGI BANGKA BELITUNG	DIPA-005.03.2.663404/2026	2026-05	3	03.04	BF	1049	AEA	003	Koordinasi Percepatan Penyelesaian Perkara di Lingkungan Peradilan Umum	kegiatan	1	0	0.3	Kegiatan Rakor akan dilaksanakan di bulan Juni 2026	14.650.000	0	0	0	0	0	0	0	2026-06-03	2026-06-03	000-2026	00-2026	Bukan Prioritas Nasional	00.00-2026	Bukan Program Prioritas	00.00-2026	Tidak Ada Informasi	Tidak Ada Informasi	Bukan Major Project	0	0
22	2026	005	MAHKAMAH AGUNG	03	Dijlen Badan Peradilan Umum	663404	PENGADILAN TINGGI BANGKA BELITUNG	DIPA-005.03.2.663404/2026	2026-06	4	03.04	BF	1049	AEA	001	Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Aparatur Tenaga Teknis di Lingkungan Peradilan Umum	kegiatan	6	4	72.83	Kegiatan Birwas untuk Semester I sudah selesai dilaksanakan	60.450.000	42.537.500	42.537.500	0	0	0	0	70.37	2026-07-01	2026-07-01	000-2026	00-2026	Bukan Prioritas Nasional	00.00-2026	Bukan Program Prioritas	00.00-2026	Tidak Ada Informasi	Tidak Ada Informasi	Bukan Major Project	0	0
23	2026	005	MAHKAMAH AGUNG	03	Dijlen Badan Peradilan Umum	663404	PENGADILAN TINGGI BANGKA BELITUNG	DIPA-005.03.2.663404/2026	2026-06	4	03.04	BF	1049	AEA	003	Koordinasi Percepatan Penyelesaian Perkara di Lingkungan Peradilan Umum	kegiatan	1	1	100	Kegiatan Rakor sudah dilaksanakan	14.650.000	14.410.200	14.410.200	0	0	0	0	98.36	2026-07-01	2026-07-01	000-2026	00-2026	Bukan Prioritas Nasional	00.00-2026	Bukan Program Prioritas	00.00-2026	Tidak Ada Informasi	Tidak Ada Informasi	Bukan Major Project	0	0
24	2026	005	MAHKAMAH AGUNG	03	Dijlen Badan Peradilan Umum	663404	PENGADILAN TINGGI BANGKA BELITUNG	DIPA-005.03.2.663404/2026	2026-06	4	03.04	BF	1049	BCA	U01	Perkara Pidana Yang Diselesaikan di Tingkat Banding di wilayah Barat	Perkara	95	70	57.46	Realisasi sudah sesuai	43.415.000	24.946.000	24.946.000	0	0	0	0	57.46	2026-07-01	2026-07-01	000-2026	00-2026	Bukan Prioritas Nasional	00.00-2026	Bukan Program Prioritas	00.00-2026	Tidak Ada Informasi	Tidak Ada Informasi	Bukan Major Project	0	0
25	2026	005	MAHKAMAH AGUNG	03	Dijlen Badan Peradilan Umum	663404	PENGADILAN TINGGI BANGKA BELITUNG	DIPA-005.03.2.663404/2026	2026-04	3	03.04	BF	1049	AEA	001	Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Aparatur Tenaga Teknis di Lingkungan Peradilan Umum	kegiatan	6	4	72	Kegiatan Birwas untuk Semester I sudah selesai dilaksanakan	60.450.000	41.937.500	41.937.500	0	0	0	0	69.38	2026-05-02	2026-05-02	000-2026	00-2026	Bukan Prioritas Nasional	00.00-2026	Bukan Program Prioritas	00.00-2026	Tidak Ada Informasi	Tidak Ada Informasi	Bukan Major Project	0	0
26	2026	005	MAHKAMAH AGUNG	03	Dijlen Badan Peradilan Umum	663404	PENGADILAN TINGGI BANGKA BELITUNG	DIPA-005.03.2.663404/2026	2026-05	3	03.04	BF	1049	AEA	004	Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Aparatur Tenaga Teknis Percepatan Penyelesaian Perkara	kegiatan	1	0	0.3	Kegiatan Baru akan dilaksanakan di triwulan 3 2026 segera setelah anggaran blokir dibuka	111.318.000	0	0	0	0	0	0	0	2026-06-03	2026-06-03	000-2026	00-2026	Bukan Prioritas Nasional	00.00-2026	Bukan Program Prioritas	00.00-2026	Tidak Ada Informasi	Tidak Ada Informasi	Bukan Major Project	0	0
27	2026	005	MAHKAMAH AGUNG	03	Dijlen Badan Peradilan Umum	663404	PENGADILAN TINGGI BANGKA BELITUNG	DIPA-005.03.2.663404/2026	2026-01	1	03.04	BF	1049	BCA	U01	Perkara Pidana Yang Diselesaikan di Tingkat Banding di wilayah Barat	Perkara	95	20	10	Jumlah Perkara Putus sebanyak 20 Perkara, belum ada realisasi keuangan, karena pertanggung jawaban dilaksanakan di bulan februan 2026	43.415.000	0	0	0	0	0	0	0	2026-04-17	2026-04-17	000-2026	00-2026	Bukan Prioritas Nasional	00.00-2026	Bukan Program Prioritas	00.00-2026	Tidak Ada Informasi	Tidak Ada Informasi	Bukan Major Project	0	0
28	2026	005	MAHKAMAH AGUNG	03	Dijlen Badan Peradilan Umum	663404	PENGADILAN TINGGI BANGKA BELITUNG	DIPA-005.03.2.663404/2026	2026-06	4	03.04	BF	1049	BCA	U02	Perkara Pidana Korupsi yang Diselesaikan Ditingkat Banding di wilayah Barat	Perkara	15	6	49.66	Belum ada perkara putus untuk pidana tipikor, realisasi berupa perpanjangan penahanan dan ATK	10.650.000	3.537.500	3.537.500	0	0	0	0	33.22	2026-07-01	2026-07-01	000-2026	00-2026	Bukan Prioritas Nasional	00.00-2026	Bukan Program Prioritas	00.00-2026	Tidak Ada Informasi	Tidak Ada Informasi	Bukan Major Project	0	0
29	2026	005	MAHKAMAH AGUNG	03	Dijlen Badan Peradilan Umum	663404	PENGADILAN TINGGI BANGKA BELITUNG	DIPA-005.03.2.663404/2026	2026-04	3	03.04	BF	1049	BCA	U02	Perkara Pidana Korupsi yang Diselesaikan Ditingkat Banding di wilayah Barat	Perkara	15	2	17	Belum ada perkara putus untuk pidana, realisasi berupa perpanjangan penahanan dan ATK	10.650.000	1.711.500	1.711.500	0	0	0	0	16.07	2026-05-02	2026-05-02	000-2026	00-2026	Bukan Prioritas Nasional	00.00-2026	Bukan Program Prioritas	00.00-2026	Tidak Ada Informasi	Tidak Ada Informasi	Bukan Major Project	0	0
30	2026	005	MAHKAMAH AGUNG	03	Dijlen Badan Peradilan Umum	663404	PENGADILAN TINGGI BANGKA BELITUNG	DIPA-005.03.2.663404/2026	2026-06	4	03.04	BF	1049	AEA	004	Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Aparatur Tenaga Teknis Percepatan Penyelesaian Perkara	kegiatan	1	0	0.4	Kegiatan Baru akan dilaksanakan di triwulan 3 2026 segera setelah anggaran blokir dibuka	111.318.000	0	0	0	0	0	0	0	2026-07-01	2026-07-01	000-2026	00-2026	Bukan Prioritas Nasional	00.00-2026	Bukan Program Prioritas	00.00-2026	Tidak Ada Informasi	Tidak Ada Informasi	Bukan Major Project	0	0



**PENGADILAN TINGGI BANGKA BELITUNG
JL. PULAU BANGKA PEMPROV BABEL
KEL. AIR ITAM, KEC. BUKIT INTAN
PANGKALPINANG 33148**

**☎ (0717) 439351 / 🖨 (0717) 439352
✉ keuangan.ptbabel@gmail.com
🌐 www.pt-babel.go.id**

